

**ANALISIS PROSES DEKLARASI DARURAT MILITER PRESIDEN YOON  
SEOK-YEOL DALAM PERSPEKTIF *EXECUTIVE AGGRANDIZEMENT***

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**CITRA ANGELINA SAROYO**

22323194

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

**ANALISIS PROSES DEKLARASI DARURAT MILITER PRESIDEN YOON  
SEOK-YEOL DALAM PERSPEKTIF *EXECUTIVE AGGRANDIZEMENT***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**CITRA ANGELINA SAROYO**

**22323194**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Proses Deklarasi Darurat Militer Presiden Yoon Seok-Yeol dalam  
Perspektif *Executive Aggrandizement***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Irawan Jati, S.I.P., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

  
  


### Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Angelina Saroyo  
Tempat dan Tanggal Lahir : Karanganyar, 25 Juni 2004  
Alamat : Sembungan Rt 04 Rw 04 Malanggaten, Kebakkramat, Karanganyar,  
Jawa Tengah  
NIM : 22323194  
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Februari 2026



Citra Angelina S.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian “Analisis Proses Deklarasi Darurat Militer dalam Perspektif *Executive Aggrandizement*” hingga akhir. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun berkat dukungan dari yang senantiasa menemani berhasil memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho, rahmat, hidayah, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.
2. Ayah dan Mama yang selalu memberi Penulis dukungan, kasih sayang, dan memahami kondisi Penulis. Terima kasih karena selalu mendukung dan percaya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kepercayaan diri untuk menyelesaikan penelitian dan studi penulis.
3. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih atas bimbingannya yang tidak sebentar ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Bapak Hangga Fathana, SIP., B.Int.St., MA. selaku Dosen Metodologi Penelitian Tugas Akhir penulis.

5. Seluruh Dosen di Program Studi Hubungan Internasional, terima kasih sudah membimbing Penulis dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ini sehingga penulis mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat.
6. Kedua kakak saya Dorry Paramitasari Saroyo dan Aditya Hapsoro Saroyo Saputro, yang tiada henti memberikan dorongan, semangat serta doa.
7. Sahabat-sahabat dan orang terkasih Penulis, Haekal Shafarullah Al Kautsar, Najwa Syifa Habibillah, Rina Umabaihi, Alya Cahya Agitha, Vikri Aviva Mustaqim dan Muhammad Rahman Ashidieq yang selalu memberikan semangat serta kepercayaan bahwa Penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama masa perkuliahan ini, yang selalu berbagi suka dan duka, yang selalu menemani Penulis bermain selama kurang lebih 3 tahun ini. Penulis sangat berterima kasih karena kalian semua hadir di hidup Penulis.
8. Teman-teman Fordo, Salima dan Kalam yang tidak sengaja bertemu namun berhasil memberikan kenangan berarti bagi Penulis. Walaupun sebentar waktu kita untuk bertemu namun kehadiran kalian sebagai teman berjuang dari malam hingga pagi menjadi kenangan berharga bagi Penulis.
9. Sahabat-sahabat sekolah saya, La'salina Zerlindah Mufarihana dan Tiara Anugrahaning Widi. Walaupun kita jauh dan jarang bertemu namun terima kasih sudah selalu menjadi semangat Penulis.
10. Citra Angelina Saroyo sebagai Penulis penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran dan semangat yang sudah diberikan selama kurang lebih satu

semester untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih sudah berjuang hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang diperjuangkan hingga saat ini.

11. Fordo *Coffeshop*, terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman bagi Penulis untuk mengerjakan Penelitian ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Cakupan penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka .....	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara .....	9
1.8 Metode Penelitian.....	10
1.8.1 Jenis Penelitian.....	10
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	10
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	11
1.8.4 Proses Penelitian .....	11
1.9 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II</b>	
<b>TENDENSI OTORITARIANISME DI REPUBLIK KOREA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Dinamika Politik Republik Korea Pasca-Demokratisasi .....	15
2.2 Kepresidenan Yoon Seok-Yeol dan Sentralisasi Kekuasaan .....	23
<b>BAB III</b>	
<b>KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN DEKLARASI DARURAT MILITER PRESIDEN YOON SEOK-YEOL</b> .....	<b>29</b>
3.1 <i>Inkrementalisme</i> .....	30
3.2 Retorika Demokrasi.....	35
3.3 <i>Sistemicity</i> .....	39
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Rekomendasi .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>55</b>

## ABSTRAK

Deklarasi darurat militer dilakukan oleh Presiden Yoon Seok-yeol sebagai pernyataan bahwa adanya keadaan yang mengancam stabilitas negara. Darurat militer ini terjadi karena adanya pola kebijakan yang menyebabkan kemunduran demokrasi dan ketidakstabilan nasional Republik Korea. Kemunduran demokrasi itu sendiri menjadi bagian dari proses yang berkembang sejak masa pemerintahan Presiden Yoon Seok-yeol, yang ditandai dengan adanya ketegangan antara pemerintah dan partai oposisi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kemunduran demokrasi yang menyebabkan deklarasi darurat militer tersebut serta peran Majelis Nasional yang didominasi partai oposisi dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan perspektif *Executive aggrandizement* sebagai kerangka pemikiran untuk mengidentifikasi pola-pola yang menyebabkan kemunduran demokrasi terjadi pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang berbasis pada literasi laman resmi, jurnal, dan *newspaper article*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyempitan kekuasaan menyebabkan ketidakstabilan internal dari dalam sehingga mendatangkan fenomena besar untuk memperluas kekuasaan pemimpin yang kemudian menggunakan kepentingan nasional untuk melindungi citra pemimpin.

**Kata-kata kunci:** Deklarasi darurat militer, Majelis Nasional, Demokrasi, Kekuasaan

## ABSTRACT

*The declaration of martial law was made by President Yoon Seok-yeol as a statement that there was a threatening situation. This martial law occurred due to a pattern of policies that caused the decline of democracy and national instability in the Republic of Korea. The decline of democracy itself was part of a process that had been developing since the administration of President Yoon Seok-yeol, which was marked by tensions between the government and the opposition party. Therefore, this study aims to identify the process of democratic decline that led to the declaration of martial law and the role of the opposition-dominated National Assembly in running the government. This study uses the perspective of Executive aggrandizement as a framework to identify the patterns and democracy that occurred during that period. This study used qualitative methods with secondary data based on official websites, journals, and newspaper articles. The result of the study shows that the narrowing of power has caused internal instability, leading to a major phenomenon of expanding the leader's power, who then uses national interest to protect the leader's image.*

**Keywords:** *Martial law, National Assembly, Democraton, Powe*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Deklarasi darurat militer adalah sebuah pernyataan yang dilakukan oleh eksekutif karena adanya keadaan yang mengancam keamanan nasional suatu negara. Dalam praktiknya, deklarasi dapat memberikan kewenangan khusus terhadap negara untuk melibatkan militer dalam pelaksanaannya (Cornell Law School, n.d.). Mark Neocleus dalam jurnalnya menyebutkan bahwa deklarasi darurat militer dapat digunakan oleh eksekutif untuk menciptakan kewenangan istimewa seperti pada adanya instruksi anggota militer untuk mengatur negara. Hal tersebut diatur diluar undang-undang kekuasaan lembaga negara (Neocleous 2007).

Deklarasi darurat militer juga diatur dalam Konstitusi Republik Korea yang menyatakan bahwa deklarasi dapat dilakukan pada saat negara mengalami masa krisis seperti perang, konflik bersenjata, atau keadaan nasional serupa (Korean Constitution, n.d.). Ketiadaan masa krisis yang disebutkan dalam Konstitusi Republik Korea, maka deklarasi darurat militer seharusnya tidak dilaksanakan. Deklarasi darurat militer pernah terjadi di Republik Korea pada tahun 1961 yaitu pada masa pemerintahan Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan. Namun, darurat militer tersebut menuai kritikan tajam dan demonstrasi oleh masyarakat Republik Korea.

Hal tersebut memicu lahirnya demokrasi di Republik Korea untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang diduduki oleh perwira-perwira militer sebelumnya (Myung-kim, n.d.). Pada masa transisi ini banyak kekuatan yang berkembang dalam menguatkan demokrasi di Republik Korea. Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat ini

menciptakan perubahan konstitusi pada *article 77*. Pasal ini mengatur bahwa ketika deklarasi darurat militer dilakukan maka Presiden harus segera melaporkan kepada Majelis Nasional tanpa penundaan sehingga Majelis Nasional dapat menilai apakah deklarasi tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Republik Korea. Hal tersebut merupakan sistem yang lazim bagi negara demokrasi untuk melakukan sistem *check and balance*<sup>1</sup> supaya tidak ada tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan (Muhammad 2025).

Republik Korea memiliki sistem *check and balances* yang dinilai berfungsi dengan baik dalam tugasnya membatasi kekuasaan eksekutif (Nasution and Geofani 2025). Sistem *check and balances* menjadi suatu sistem yang efektif di dalam negara demokrasi karena dapat menjadi mekanisme untuk mencegah tindakan tidak penting di luar kewenangan lembaga negara. Sistem *check and balances* yang lemah dapat mengakibatkan adanya kemunduran demokrasi karena hubungan antar lembaga negara yang tidak seimbang (Hall 2025).

Kemunduran demokrasi suatu negara dapat mengakibatkan resiko-resiko yang mengancam stabilitas nasional dan stabilitas politik internal negara (Bermeo 2016). Dalam hal ini Republik Korea mengalami pada masa Presiden Yoon dimana Ia melakukan veto secara berulang seperti pada rancangan undang-undang pembentukan nasihat khusus serta rancangan undang-undang penerbitan *voucher* mata uang lokal untuk meningkatkan perekonomian, pemilihan ketua menteri oleh dirinya sendiri, dan

---

<sup>1</sup> *Check and balance* merupakan pemisahan kekuasaan untuk menempatkan legislatif, eksekutif, yudikatif berdasarkan tugasnya. *Check and balance* bertujuan untuk menghindari adanya kekuasaan yang tersentralisasi serta memberi batasan terhadap lembaga negara (Rozaq, Batara, and Jaya 2024).

penghapusan kementerian (The Korea Times 2024b). Tindakan-tindakan ini mengganggu mekanisme *check and balances* sehingga berdampak pada ketegangan hubungan antar-lembaga negara. Ketegangan pada masa Presiden Yoon tersebut menjadi pola yang tersistematisasi dari adanya kemunduran demokrasi. Pola-pola yang tersistematisasi tersebut mendorong Presiden Yoon untuk melakukan fenomena deklarasi darurat militer.

Deklarasi tersebut dilakukan oleh Presiden Yoon Seok-yeol dengan alasan kepentingan nasional dan kekuatan anti-negara pro-Utara yang mengancam Republik Korea. Deklarasi yang seharusnya dilakukan pada saat masa krisis yang ditunjukkan di dalam Konstitusi Republik Korea dikesampingkan oleh Presiden Yoon karena tidak ada kejadian darurat yang mengancam Republik Korea pada masa itu (Frances and Jake 2024). Tidak hanya itu, sistem *check and balance* yang ada di Republik Korea juga mengalami kecacatan karena deklarasi yang dilakukan tanpa persetujuan Majelis Nasional.

Majelis Nasional sebagai lembaga tertinggi di sistem parlemen Republik Korea menjadi suara sah atas terjadinya deklarasi darurat militer. Majelis Nasional di Republik Korea memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan mengesahkan kebijakan. Selain itu, Majelis Nasional juga menjadi pengawas dari sistem *check and balances* yang ada di Republik Korea itu sendiri. Majelis Nasional memiliki anggota yang dipilih langsung oleh rakyat, dimana rakyat memilih anggota dari Partai Demokrat atau Partai Konservatif (National Assembly South Korea n.d.). Pada masa pemerintahan Presiden Yoon, partai yang berhasil memenangkan pemilihan adalah Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi. Sementara itu, Presiden Yoon berasal

dari Partai Kekuatan Rakyat yang merupakan partai konservatif (Hyung-Jin 2024). Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya ketegangan pengambilan kebijakan oleh Presiden Yoon.

Ketegangan yang dialami oleh Presiden Yoon sejak awal menjabat menjadi penyebab dari adanya kemunduran demokrasi.. Ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif terus meningkat karena adanya dominasi partai oposisi (Gi-wook, n.d.). Bahkan sejak sebelum menjabat, Presiden Yoon sudah memberikan janji-janji untuk demokrasi Republik Korea sehingga memperoleh dukungan dari pendukung untuk menjadikannya sebagai presiden. Namun, janji demokrasi tersebut tidak demikian dengan implementasinya di masa jabatannya sebagai Presiden dimulai seperti banyaknya veto yang Ia lakukan untuk melindungi citranya sebagai Presiden (The Korea Times 2024b).

Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Yoon memang banyak terjadi ancaman yang dilakukan oleh pihak eksternal negara yaitu Korea Utara. Pada masa itu, Korea Utara sedang melakukan provokasi nuklir seperti adanya uji coba rudal balistik di kawasan Asia Timur khususnya terhadap Republik Korea (The Korea Times 2024a). Namun tidak adanya respon tegas yang dilakukan oleh Majelis Nasional sehingga Presiden Yoon menganggap adanya mata-mata anti-negara di Majelis Nasional (NBC News 2025). Padahal sebenarnya Majelis Nasional hanya bersikap rasional yaitu dengan menunggu respon Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pemberi sanksi mengenai senjata nuklir yang ada di Korea Utara (Tirtalaksana\*, Hardiwinoto, and Idris 2016). Namun Presiden Yoon ingin segera menangani provokasi tersebut dan

ditolak oleh Majelis Nasional sehingga membuat kekuasaan Presiden Yoon semakin tertekan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi antara pernyataan perlindungan demokrasi dan praktik di dalam kebijakan Presiden Yoon yang justru melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu kebebasan dan keadilan (Owen 2003). Dalam konteks ini maka dapat diteliti bahwa adanya proses kemunduran demokrasi secara perlahan dan tersistematisasi melalui pelemahan konstitusi dari dalam. Demokrasi yang diperjuangkan sejak masa kepemimpinan Presiden Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon jae-in mengalami gejala kembali pada masa pemerintahan Presiden Yoon. Dalam konteks ini deklarasi darurat militer dipahami sebagai dampak dari adanya kemunduran demokrasi yang diciptakan secara sistematis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah proses kemunduran demokrasi Republik Korea pada era Presiden Yoon Seok-yeol berujung pada deklarasi darurat militer?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Seok-yeol.
2. Mengidentifikasi fungsi Majelis Nasional Republik Korea sebagai *check and balance* terhadap kebijakan Presiden.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini mencakup fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi sejak Presiden Yoon Seok-yeol menjabat yaitu tahun 2022. Kemunduran demokrasi terus

terjadi melalui pelemahan konstitusi secara perlahan yang dilakukan sejak Presiden Yoon menjadi Presiden Republik Korea. Proses kemunduran demokrasi yang dilakukan Presiden Yoon Seok-yeol yang dilakukan sejak awal menjabat adalah melakukan veto secara berulang, pemilihan ketua menteri oleh dirinya sendiri, dan penghapusan kementerian. . Proses kemunduran demokrasi ini memberikan pengaruh hingga puncak terjadinya peristiwa deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Maka dari itu penelitian ini akan membahas dari tahun 2022, peristiwa pada saat deklarasi darurat militer, hingga pada saat Presiden Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional Republik Korea.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini berfungsi untuk menelaah berbagai kajian terdahulu yang relevan dengan kemunduran demokrasi sehingga menyebabkan deklarasi darurat militer dan kajian mengenai perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Negara. Kajian ini diharapkan dapat membangun pemahaman teoritis mengenai penempatan militer di kursi parlemen yang tidak benar dan menyebabkan ketidakstabilan sistem internal politik Republik Korea.

Kajian pertama yang mendasari penelitian ini adalah literatur mengenai perkembangan demokrasi yang ada di Republik Korea. Demokratisasi di Republik Korea merupakan hasil perjuangan rakyat pada gerakan mengakhiri kudeta militer pada 1980. Namun, stabilitas demokrasi di Republik Korea tidak sepenuhnya terjadi. Hal ini terlihat pada demonstrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye, di mana demonstrasi tersebut bertujuan untuk memakzulkan Park Geun-hye. Sehingga peristiwa tersebut menjadi bagian dari dinamika ketegangan politik oleh

penguasa di Republik Korea. Maka dari itu kajian ini menunjukkan adanya kemunduran atau ketidakstabilan demokrasi yang sudah muncul bahkan sebelum pemerintahan Presiden Yoon Seok-yeol (Kang 2017).

Selanjutnya, kajian mengenai reaksi pemimpin Republik Korea dalam menghadapi provokasi senjata nuklir Korea Utara. Ancaman nuklir oleh Korea Utara dapat dikelola melalui reaksi oleh pemimpin Republik Korea dalam memastikan bahwa ancaman tersebut tidak terjadi. Presiden Moon Jae-in melakukan pendekatan negosiasi dan diplomasi dengan cara diskusi dengan Korea Utara terhadap ancaman nuklir tersebut. Namun berbeda dengan dua presiden sebelumnya yaitu Lee Myung-bak dan Park Geun-hye yang bersikap agresif dengan meningkatkan militer Republik Korea untuk menghadapi ancaman. Sehingga dalam kajian ini menunjukkan adanya perbedaan respon di setiap Presiden di Republik Korea (International Crisis 2018).

Terakhir yaitu kajian mengenai deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Seok-yeol yang dikaitkan dengan demokrasi serta ketidakamanan ekonomi. Kajian ini menjelaskan mengenai deklarasi darurat militer melalui kacamata *chaebol* di Republik Korea yang memengaruhi sistem politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya struktur ekonomi yang memengaruhi dinamika institusional di Republik Korea (Fleckenstein and Lee 2025).

Berdasarkan ketiga kajian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya membahas mengenai dinamika demokrasi di Republik Korea pada masa Park Geun-hye, respon kebijakan negosiasi oleh Presiden Moon Jae-in terhadap ancaman nuklir Korea Utara, serta pengaruh struktur ekonomi terhadap sistem politik. Namun, berbagai penelitian tersebut belum ada yang menganalisis keterkaitan antara

kemunduran demokrasi yang menyebabkan deklarasi dan bagaimana demokrasi itu dibenarkan karena adanya ancaman dari Korea Utara. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kemunduran demokrasi dapat mengakibatkan deklarasi darurat militer serta justifikasi yang melibatkan ancaman nuklir Korea Utara.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Deklarasi yang melibatkan pemerintahan, militer, dan masyarakat sipil ini merupakan fenomena yang besar bagi politisi yang ada di Republik Korea dan dunia. Melalui kajian-kajian teori terdahulu, penelitian ini akan dianalisis menggunakan konsep *Executive Aggrandizement* oleh Tarunabh Khaitan yang menjelaskan mengenai perluasan kekuasaan eksekutif dalam krisis konstitusionalisme demokrasi liberal.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa ekspansi eksekutif dapat melemahkan lembaga-lembaga internal sehingga dapat berdampak langsung terhadap keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara yang dapat menyebabkan krisis. Berdasarkan perspektif yang digagas oleh Khaitan, tindakan terdapat kategori krisis konstitusionalisme demokratis dan krisis akuntabilitas eksekutif sebagai salah satu penyelewengan tanggung jawab eksekutif yang seharusnya melindungi demokrasi negara menjadi melemahkan demokrasi negara. Dalam krisis akuntabilitas eksekutif, eksekutif dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin atas kegagalannya dalam menjaga demokrasi. Eksekutif sebagai cabang paling tinggi namun juga cabang berbahaya dalam menentukan kebijakan diluar kendali (Khaitan 2019).

*Executive Aggrandizement* mempunyai empat mekanisme dalam mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di Republik Korea tersebut merupakan suatu kemunduran demokrasi. Pertama, fusi partai-negara dimana adanya keinginan

pemimpin untuk mengisi lembaga negara dengan partai politik yang tidak terpilih untuk menghilangkan batas kepentingan antara partai politik dan kepentingan negara. Kedua, *inkrementalisme* yaitu proses dimana eksekutif politik melemahkan konstitusi secara perlahan sehingga dapat menyebabkan kemunduran demokrasi. Dalam hal ini pemimpin secara sengaja melanggar aturan konstitusi negaranya. Ketiga, retorika demokrasi yaitu para pemimpin yang menjanjikan kebijakan dalih untuk mempertahankan demokrasi namun kenyataannya hal tersebut melemahkan demokrasi. Keempat, *sistemicity* yaitu pemimpin yang membunuh demokrasi dengan sistematis biasanya diawali dengan hal-hal kecil untuk menghindari kekacauan di awal namun pada akhirnya membuat kebijakan yang dapat mengakibatkan kekacauan (Khaitan 2019).

Berdasarkan kerangka tersebut, dengan demikian fenomena Deklarasi Darurat Militer akan ditinjau melalui bagaimana Presiden Yoon melakukan tiga dari empat mekanisme tersebut yaitu *inkrementalisme*, retorika demokrasi, dan *sistemicity* untuk memperluas kekuasaannya. Perluasan kekuasaan Presiden Yoon disini akan diteliti dengan adanya beberapa pola kemunduran demokrasi sehingga menyebabkan fenomena yang lebih besar. Hal ini dapat dipahami bukan sebagai perlindungan keamanan nasional tetapi sebagai bentuk ekspansi kekuasaan eksekutif yang mengancam kemunduran demokrasi Republik Korea.

### **1.7 Argumen Sementara**

Proses kemunduran demokrasi pada era Presiden Yoon Seok-yeol berujung pada deklarasi darurat militer karena adanya upaya Presiden Yoon Seok-yeol dalam menguatkan kekuasaannya dari dominasi partai oposisi dengan cara menciptakan

kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kemunduran demokrasi. Dalam perspektif *executive aggrandizement*, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk dari mekanisme *inkrementalisme* yaitu adanya tindakan veto terhadap beberapa rancangan kebijakan yang diajukan oleh Majelis Nasional. Selain itu, Presiden Yoon juga melakukan retorika demokrasi yang dilakukan pada saat pidato kemenangan, di mana Presiden Yoon menegaskan adanya komitmen untuk membawa Republik Korea menuju demokrasi liberal. Rangkaian tindakan ini kemudian membentuk *systemicity*, yaitu pola kebijakan dari proses-proses kemunduran demokrasi yang menyebabkan fenomena deklarasi darurat militer. Meskipun dalam perspektif *eksekutif aggrandizement* terdapat mekanisme fusi partai-negara namun mekanisme ini tidak menjadi hal yang dominan dalam proses kemunduran demokrasi karena Presiden Yoon tidak menempatkan anggota partainya di kursi parlemen namun menempatkan jaksa-jaksa dan anggota militer di kursi parlemen.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data berbasis analisis wawancara, observasi, analisis dokumen, analisis kepustakaan, dan lain-lain (Abdussamad 2021). Penulis akan menguraikan data-data yang telah didapat menggunakan narasi dan tatanan kalimat yang akan menjadi pembahasan tulisan ini .

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian ini adalah Presiden Yoon Seok-Yul. Sedangkan objek penelitian ini adalah deklarasi darurat militer tanpa sepengetahuan majelis nasional dan reaksi masyarakat sipil yang ditimbulkan dari deklarasi darurat militer tersebut.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penulis meneliti dengan menggunakan data sekunder yaitu melalui pihak ketiga dalam analisisnya. Penulis menganalisis melalui data jurnal, buku, *website*, dan *research report* untuk menulis tulisan ini.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian ini penulis memulai dengan mengidentifikasi masalah yang kemusia melakukan studi literatur untuk memastikan bahwa penelitian ini masih dapat diteliti lebih lanjut. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi ke dalam bab maupun sub-bab. Kemudian penulis membuat kesimpulan atas data-data yang dikumpulkan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Pada tahap ini penulis akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam proses penulisan tugas akhir yang disusun dari 4 bab sebagai berikut:

### **BAB I:**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## BAB II:

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tendensi otoritarianisme yang terjadi di Republik Korea. Penjelasan pada bab ini akan menjelaskan pola kemunduran demokrasi yang pernah terjadi di Republik Korea dari kepemimpinan Kim Dae-jung hingga Moon jae-in. Selain itu dijelaskan juga mengenai sentralisasi kekuasaan Presiden Yoon Seok-yeol serta kebijakannya yang menggerus prinsip demokrasi.

## BAB III:

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai deklarasi darurat militer melalui analisis *executive aggrandizement* untuk menganalisis pola dari kemunduran demokrasi Presiden Yoon Seok-yeol sehingga terjadilah deklarasi darurat militer sebagai fenomena puncak kemunduran demokrasi.

## BAB IV:

Setelah menguraikan pembahasan topik dari BAB I hingga BAB III, penelitian akan dirangkum semua hasil penelitian dan menarik kesimpulan dan saran yang nantinya dapat berguna pada penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TENDENSI OTORITARIANISME DI REPUBLIK KOREA**

Tendensi otoritarianisme merupakan rezim yang sudah mengakar sejak pasca-kemerdekaan Republik Korea. Tendensi otoritarianisme diakibatkan oleh adanya kudeta militer pada tahun 1961 hingga 1980 dimana adanya rezim otoriter yang melakukan kudeta di kursi parlementer. Rezim otoriter tersebut menyebabkan adanya hirarki dan birokrasi Republik Korea yang mengakar terhadap Presiden. Rezim otoriter yang menyebabkan kudeta militer tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat dan korban di Republik Korea sehingga diperlukan revolusi untuk menghapus trauma tersebut (Myung-kim, n.d.).

Trauma melalui kudeta militer dua kali yang dipimpin oleh Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan menyebabkan Republik Korea berada pada bayang-bayang otoritarianisme yang berlangsung lama. Tidak hanya meninggalkan bayang-bayang pada masyarakat namun sistem pemerintahan juga menjadi sulit untuk melakukan revolusi sehingga tugas utama pemimpin pasca-otoritarianisme adalah menghapus warisan masa lalu yang ada di Republik Korea.

Trauma tersebut menjadi awal terciptanya pemerintahan demokrasi untuk membersihkan trauma militer masa lalu. Maka dari itu, pada bab ini akan membahas pemerintahan pada masa demokrasi Republik Korea yang terjadi pada masa kepemimpinan Kim Dae-Jung, Roh Moo-Hyun, Lee Myung-Bak, Park Geun-Hye, dan Moon Jae-In sehingga dapat ditautkan ke deklarasi darurat militer oleh Yoon Seok-yeol. Sehingga pendekatan akan digunakan untuk memperlihatkan bagaimana presiden

pasca-otoritarianisme berjalan dibawah bayang-bayang trauma sejarah, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang sebelumnya dikendalikan oleh militer.

Republik Korea sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang sudah dianut sejak kemerdekaan tahun 1948 melakukan penambahan masa jabatan presiden setelah rezim otoriter runtuh yaitu presiden hanya dapat menjabat selama 5 tahun (Wastia 2019). Namun sistem presidensial ini menyebabkan kekuasaan yang menciptakan kecenderungan presiden untuk membuat kebijakan maupun keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan otoriter Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan.

Selain itu, sistem presidensial di Republik Korea dapat dikaitkan terhadap akar konfusianisme yang sudah lama terjadi di Republik Korea. Konfusianisme mengajarkan bahwa kekuasaan dan hirarki tertinggi yang ada di sebuah negara adalah pemimpin atau presiden (Sleziak 2013). Dimana Republik Korea menganggap presiden sebagai figur penting dalam mengambil keputusan krusial. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan Republik Korea sejak zaman dahulu sudah memusatkan kekuasaan terhadap presiden sehingga dalam hal ini dapat mengakibatkan kekuasaan yang terpusat (Nasution and Geofani 2025). Perluasan eksekutif berkelanjutan yang dapat menyebabkan kemunduran demokrasi bagi suatu negara.

Maka dari itu, penelitian pada bab ini akan dijelaskan mengenai optimalisasi demokrasi masing-masing pemimpin pasca-demokrasi dengan penghapusan warisan otoritarianisme hingga kemunduran demokrasi yang terjadi beberapa kali. Hingga

kemunduran demokrasi yang terjadi terakhir kali pada masa pemerintah Presiden Yoon.

## **2.1 Dinamika Politik Republik Korea Pasca-Demokratisasi**

Pasca transisi demokrasi pada akhir dekade 1980-an Republik Korea memasuki fase politik yang ditandai oleh upaya konsolidasi demokrasi, restrukturisasi hubungan sipil-militer, serta pemulihan trauma warisan otoritarianisme. Republik Korea membutuhkan beberapa dekade untuk memperbaiki sistem tatanan otoriter tersebut. Dimulai dari Presiden Roh Tae-Woo yang membawa citra demokratisasi hingga Presiden Kim Dae-Jung. Perbaikan sistem otoriter Republik Korea diupayakan untuk menghilangkan warisan otoritarianisme yang telah mengakar. Otoritarianisme yang ada di Republik Korea merupakan suatu karakter politik yang bermula dari lahirnya dinamika kekuasaan pemimpin yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang telah mengakar secara historis.

Nilai-nilai Konfusianisme di Republik Korea yang sudah ada sejak zaman dinasti masih mengakar di kalangan masyarakat Republik Korea yang mempengaruhi kepemimpinan di Republik Korea karena generasi terdahulu yang masih terpengaruh dengan nilai-nilai tersebut. Konfusianisme umumnya mengajarkan mengenai adanya hirarki dan birokrasi yang sangat memperhatikan umur dan status sosial masyarakat. Maka dari itu generasi tua masih menekankan dan mengajarkan nilai-nilai Konfusianisme ke generasi muda sekarang. Nilai-nilai Konfusianisme yang sudah lama mengakar hingga hitungan abad tersebut melahirkan pemimpin-pemimpin Republik Korea yang terobsesi kepada jabatan tinggi karena jabatan tinggi yang ada tersebut

akan mempengaruhi status sosial manusia dan dapat menjadi nilai suatu orang (Sleziak 2013).

Ajaran Konfusianisme dan dampaknya terhadap generasi pemimpin Republik Korea terdapat dalam kepemimpinan Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan yang mengandalkan kekuatan otoritarianismenya. Kedua pemimpin tersebut meningkatkan pengaruh dan kontrolnya sebagai presiden untuk memimpin Republik Korea. Hal tersebut dapat diketahui bahwa kedua presiden tersebut menekankan hirarki yang mendalam bagi masyarakat Republik Korea. Seperti perintah dan peraturan yang harus dijalankan demi masa depan Republik Korea. Namun, perintah dan kontrol tersebut tidak berlandaskan nilai yang cocok untuk Republik Korea sehingga menimbulkan protes dan ketidakstabilan politik Republik Korea.

Ajaran Konfusianisme yang ada tersebut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kepemimpinan di Republik Korea. Dapat dilihat melalui Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan yang mengantarkannya ke dalam otoritarianisme (Lee and Magenda 2019). Maka dari itu diperlukan reformasi untuk mengubah rezim yang sudah diciptakan oleh kedua presiden tersebut. Adanya keinginan reformasi tersebut melahirkan rezim demokrasi untuk mulai digagas demi kelangsungan kebebasan Republik Korea.

Reformasi rezim demokrasi mulai digagas dengan benar pada masa Presiden Kim Dae-jung (Presiden Kim) yang merupakan presiden dengan jejak pengalaman langsung terhadap rezim otoriter dan secara vokal menolak rezim otoriter hingga menerima ancaman hukuman mati karena dianggap melawan pemerintah. Presiden Kim dengan rezim demokrasinya berusaha menghapus rezim otoriter yang telah lama

ada di Republik Korea dengan melakukan *transfer* kekuasaan besar dengan secara vokal memperlihatkan bahwa ia merupakan presiden anti-otoritarianisme.

Tidak hanya melalui peraturan dan rezim yang berubah, Presiden Kim juga menulis buku yang secara terang-terangan mengatakan bahwa ia mengkritik pendapat Lee Kuan-yew yang mengatakan bahwa Asia Timur tidak cocok dengan rezim demokrasi barat karena sejarah masa lalunya yang sudah tertanam rezim otoriter. Kritik yang diberikan secara tertulis oleh Presiden Kim adalah adanya perhatian yang kurang terhadap hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadikan suatu negara dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi barat hingga kebangkitan demokrasi harus dimulai melalui pemerintahan yang mengutamakan rakyatnya (Dae-jung 1994). Maka dari itu Presiden Kim ingin mengubah persepsi negara lain terhadap Asia Timur sehingga Presiden Kim berupaya untuk menghapus bayang-bayang otoritarianisme masa lalu.

Mulainya penghapusan rezim otoriter selama pemerintahan Presiden Kim ini dinilai memasuki masa "*two-turnover test*" suatu istilah ketika suatu kelompok politik setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada mantan oposisi untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses demokrasi (Kauffman, n.d.). Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pada sistem politik yang dapat berkontribusi pada stabilitas sistem pemerintahan Republik Korea. Pada masa ini kerja sama dengan Amerika Serikat semakin ditingkatkan dan semakin diperkuat untuk melawan ancaman dari Korea Utara dan Tiongkok.

Tidak mudah bagi Presiden Kim untuk menghapus jejak otoriter, namun kegigihannya dalam menghapus jejak militer sudah ia dikumandangkan sejak sebelum

menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan kepada jurnalis Amerika bahwa “Demokrasi di Republik Korea tidak bisa dihindari” dan ketika ia terpilih menjadi presiden mengatakan “Ini adalah saatnya demokrasi” menjadi bukti bahwa ia ingin mengubah rezim yang dianggap keras dan tidak merealisasikan keinginan bebas rakyat (Baker 2014).

Kegigihan tersebut menjadi awal mula penghapusan jejak otoritarianisme dengan pengenalan rezim demokrasi untuk masa depan Republik Korea. Namun walaupun usahanya murni untuk menghapuskan otoritarianisme, Ia mendapatkan kritikan oleh rakyat Republik Korea karena usahanya dalam membuka keterbukaan demokrasi domestik hingga ke Korea Utara dianggap sebagai penyuaipan untuk menciptakan cita-cita demokrasinya (Baker 2014). Kontroversi tersebut tetap tidak mengubah citranya sebagai presiden yang membawa *transfer* kekuasaan.

Semangat demokrasi Presiden Kim terus berjalan hingga kepemimpinan Presiden Roh Moo-hyun (Presiden Roh) sebagai presiden anti-otoritarian melakukan penghapusan aturan-aturan tidak tertulis yang dibuat oleh rezim otoriter. Presiden Roh hadir untuk menghapus hirarki yang ada antara pemimpin dan rakyat yang sudah lama ada dan melekat di Republik Korea. Dalam pidatonya, sering kali Presiden Roh menggunakan bahasa informal supaya rakyat merasa adanya kedekatan dengan pemimpin mereka. Hal ini dapat menjadi bentuk penerapan dalam buku Presiden Kim dimana ia ingin menghapus batasan antara pemimpin dan rakyat sehingga kedua hal tersebut berada pada tujuan yang sama.

Presiden Roh memiliki tujuan dan prinsip yang sama dengan Presiden Kim yaitu menghapus jejak dan bayang-bayang otoritarianisme. Namun, upaya-upaya

Presiden Roh dalam penghapusan hirarki tersebut menuai kritikan oleh para elit Republik Korea, karena dianggap kurang berwibawa dan tidak cocok untuk bahasa pidato seorang pemimpin. Dalam hal itu dapat diketahui bahwa nilai Konfusianisme memang masih melekat di Republik Korea. Hirarki yang ada dalam Konfusianisme terutama bagi pemimpin, pebisnis, dan bagi elit tinggi masih melekat karena masa lalu konfusianisme yang panjang.

Penghapusan jejak otoritarianisme dengan presiden anti-otoritarianisme sudah berlangsung selama satu dekade dan menjadikan rezim demokrasi berkembang untuk masa depan Republik Korea. Namun, penghapusan otoritarian tersebut masih menuai kritik karena ajaran rakyat Republik Korea yang masih berdasar pada sejarah hirarki dan birokrasi masa lalu sehingga demokrasi berlangsung tidak lama. Setelah kepemimpinan dua periode demokrasi Republik Korea mengalami kemunduran demokrasi kembali karena kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak (Presiden Lee) melalui partai konservatif. Konfusianisme hirarki, birokrasi, dan gaya kepemimpinan otoriter kembali terjadi di masa Presiden Lee.

Gaya kepemimpinan dan pernyataannya yang menyatakan bahwa demonstran merupakan aksi ilegal, menjadi bukti bahwa pendekatan yang diharapkan Presiden Kim dan Presiden Roh telah mengalami kemunduran (I-hyun and Jin-bi 2008). Caranya dalam menghadapi demonstran dengan membentuk tim penangkapan khusus bagi para demonstran juga menjadi bukti bahwa rakyat tidak boleh mengkritik pemimpin. Hal tersebut sama seperti ajaran konfusianisme yang menyatakan bahwa pemimpin merupakan hirarki paling tinggi di Republik Korea (Seung-yoon 2024). Kepemimpinan tersebut menghadirkan polarisasi politik yang mengakibatkan adanya ketidakstabilan

politik domestik terhadap rakyat. Selain itu, kepemimpinan Presiden Lee juga mengalami kritik yang menyebabkan Presiden Lee turun dari kursi pemerintahan.

Namun, turunnya Presiden Lee dari kursi pemerintahan tidak mengubah partai yang dulu menaunginya untuk berkuasa karena presiden setelahnya yaitu Presiden Park Geun-hye (Presiden Park) juga menyebabkan kemunduran demokrasi di Republik Korea. Presiden Park dalam kampanyenya mengatakan akan memperbaiki krisis yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Lee. Presiden Park menjanjikan demokrasi yang berkaitan dengan masa depan Republik Korea walaupun pada kenyataannya Ia tidak benar-benar merealisasikan janjinya tersebut.

Gaya pemerintahan yang cenderung tertutup mengakibatkan adanya jalan pemerintahan yang tidak sehat (BBC News 2017). Dalam masa pemerintahannya Ia juga tidak selalu bergerak sendiri namun ada kekuatan pengaruh yang dilakukan oleh Choi Soon-sil<sup>2</sup>. Hal tersebut membuktikan lemahnya akuntabilitas Presiden Park terutama akuntabilitas terhadap pidatonya. Relasi pribadi merupakan persoalan klasik dari rezim otoriter bahkan prinsip Konfusianisme yang mementingkan status sosial dan sekelompok orang berpengaruh karena Choi Soon-sil tidak memiliki jabatan di kursi pemerintahan (Seung-yoon 2024). Ia hadir bersama Presiden Park karena Ia merupakan teman dekat dan mantan penasihat Presiden Park, sehingga Ia hadir di pemerintahan atas kekuasaan Presiden Park yang mengizinkannya (BBC News Indonesia 2018).

Hal tersebut menjadikan bukti atas faktor status sosial yang masih berpengaruh di dalam kepemimpinan Republik Korea. Tidak hanya itu, latar belakang Presiden Park

---

<sup>2</sup> Choi Soon-sil adalah teman dekat mantan Presiden Park Geun-hye yang mencampuri hubungan dan mempengaruhi kebijakan Presiden Park Geun-hye selama menjabat (BBC News Indonesia 2018).

sebagai putri mantan Presiden Park Chung-hee juga menjadikan salah satu hal yang tidak terhindarkan dalam hirarki kepemimpinan. Janji-janjinya untuk meningkatkan perekonomian Republik Korea juga dilakukan untuk meningkatkan kekuasaannya saja karena pada kenyataannya perekonomian Republik Korea turun drastis karena hutang selama Presiden menjabat (Min-sik 2013).

Kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak dan Presiden Park Geun-hye melalui Partai Saenuri menyebabkan ketidakstabilan politik yang harus segera ditangani. Demonstrasi yang dinyatakan sebagai aksi ilegal, tingginya utang negara, dan ketegangan Semenanjung Korea menjadikan Republik Korea sebagai negara dalam masa kritis untuk segera ditangani. Masa kritis selama kepemimpinan Presiden Park Geun-hye mengakibatkan ia diturunkan dari jabatannya dan mendekam di penjara akibat tuntutan-tuntutan hukum seperti penyalahgunaan wewenang dan selama Ia menjabat (BBC News Indonesia 2018). Dua kepemimpinan konservatif di Republik Korea membangkitkan semangat demokrasi pada masa kepemimpinan berikutnya yaitu Presiden Moon Jae-in.

Pengalaman masa lalu Presiden Moon Jae-in (Presiden Moon) sama dengan Presiden Kim Dae-jung dan Presiden Roh Moo-hyun yaitu mantan aktivis rezim otoriter Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan (Tempo 2024). Presiden Moon kembali hadir untuk menghapus jejak otoriter dan kembali mengembalikan Republik Korea ke jalan demokrasi. Dalam pidato kemenangannya Presiden Moon berjanji akan menyingkirkan praktik-praktik otoriter yang ada dan akan lebih dekat dengan Republik Korea. Presiden Moon menghadirkan peraturan baru bagi rakyat Republik Korea yaitu memindahkan *Blue House* kantor kepresidenan di daerah yang lebih dekat dengan

rakyat Semangat demokrasi Presiden Moon tertuang dalam pidato kemenangannya yang mengatakan bahwa “Kedaulatan rakyat sipil yang tidak puas dalam demokrasi sebelumnya akan lebih dikomunikasikan dan lebih terbuka untuk berdialog dengan rakyat baik *online* maupun *offline*.” sehingga demokrasi yang selama dua periode mundur bisa diciptakan kembali (Repub. KOREA CHEONG WA DAE, n.d.).

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa pergantian kepemimpinan di Republik Korea menyebabkan pergantian rezim partai politik calon presiden. Dalam hal tersebut partai politik memiliki peran yang signifikan dalam mengatur prinsip demokrasi yang ada di Republik Korea. Republik Korea mempunyai prinsip demokrasi keadilan dan kebebasan, dimana keadilan diwujudkan dalam kepemimpinan Presiden Roh Moo-hyun yang mencoba untuk menyamakan hirarki antara pemimpin dan rakyat, serta prinsip demokrasi bebas yang diwujudkan pada masa Presiden Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Moon Jae-in yang membebaskan masyarakat Republik Korea untuk menyatakan pendapat (Heo and Hahm 2014).

Meskipun pemerintahan Kim Dae-jung hingga Moon Jae-in yang menunjukkan fenomena adanya optimalisasi prinsip demokrasi Republik Korea, namun kemunduran demokrasi masih terjadi pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye. Di mana kedua presiden tersebut merupakan anggota partai konservatif yang didasarkan pada konfusianisme sehingga masih adanya hirarki kekuasaan antara pemimpin dan rakyat (Seung-yoon 2024). Hal tersebut masih menjadi tantangan yang dihadapi Republik Korea. Percobaan otoritarianisme yang dilahirkan kembali oleh Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye menjadi kekhawatiran masyarakat karena adanya trauma masa lalu.

Tidak hanya itu, pemerintahan setelah Presiden Moon Jae-in juga melahirkan otoritarianisme dengan melakukan kemunduran demokrasi melalui deklarasi darurat militer yang menuai kecaman oleh masyarakat Republik Korea. Deklarasi darurat militer dilakukan oleh Presiden Yoon Seok-yeol karena adanya tekanan kekuasaan oleh partai penguasa. Namun deklarasi tersebut menjadi puncak dari kemunduran demokrasi dan sentralisasi kekuasaan yang sudah dilakukan Presiden Yoon sejak awal menjabat sebagai Presiden.

## **2.2 Kepresidenan Yoon Seok-Yeol dan Sentralisasi Kekuasaan**

Setelah kembalinya masa demokrasi Republik Korea melalui mantan Presiden Moon Jae-in, Republik Korea kembali mengalami kemunduran demokrasi yang tersistematis melalui Presiden Yoon Seok-yeol (Presiden Yoon). Legitimasi Mantan Jaksa Yoon sebagai citra jaksa keadilan nasional membuat citranya menjadi baik dikalangan masyarakat. Citra Jaksa keadilan nasional tersebut didapatkan dari masalah yang ditangani yaitu mengadili pejabat biasa hingga pejabat tinggi tanpa ampun berdasarkan kasus yang dituduhkan oleh pejabat terkait. Contoh kasus yang diadili oleh Mantan Jaksa Yoon adalah mengadili Mantan Presiden Republik Korea seperti Presiden Lee Myung-bak dan Presiden Park Geun-hye (Stevens 2025). Peran Yoon Seok-yeol sebagai jaksa dalam kasus besar ini adalah membantu dalam memakzulkan dan menghukum presiden terkait. Namun peran tersebut berpengaruh terhadap bagaimana Yoon menjabat sebagai presiden di masa depan.

Citra tersebut menjadikan peran Yoon Seok-yeol sebagai jaksa mendapat kepercayaan Mantan Presiden Moon Jae-in. Kepercayaan yang didapat melalui Mantan Presiden Moon Jae-In tersebut menjadikannya dipromosikan sebagai Kepala Jaksa di

Kantor Kejaksaan di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Kota Seoul tahun 2017 (*Tempo* 2025). Namun kepercayaan yang diberikan menjadi bumerang bagi Mantan Presiden Moon karena Yoon mengadili beberapa pejabat partai yang dipercaya Presiden Moon di kursi pemerintahan. Perilakunya dalam mengadili pejabat kepercayaan Mantan Presiden Moon Jae-in mendapat pujian dari partai konservatif karena partai konservatif tertekan akibat kebijakan Mantan Presiden Moon yang dinilai longgar (*Tempo* 2025). Sehingga hal tersebut menjadi jalan bagi Mantan Jaksa Yoon untuk masuk kedalam partai konservatif.

Presiden Yoon mengganti partai yang semula sekutu yaitu Partai Demokrat dengan Moon menjadi ke Partai Konservatif yaitu Partai Kekuatan Rakyat untuk melangkahkan karir lebih lanjut menjadi Presiden dan mencalonkan diri di tahun 2022.

Selama masa kampanye presiden, Presiden Yoon secara eksplisit menggunakan kesempatan mengkritik kebijakan Presiden Moon untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kritikan yang diutarakan secara eksplisit seperti kebijakan jam kerja yang terlalu longgar dan kebijakan standar pangan yang dinilai terlalu tinggi sehingga masyarakat miskin tidak bisa membelinya. Hal tersebut menandai adanya personalistik kepemimpinannya dari awal masa kampanye. Selain itu, Presiden Yoon juga menunjukkan kekuasaannya sebagai laki-laki dan anti feminismenya melalui kritik terhadap gerakan feminis yang menyebabkan angka kelahiran rendah dan adanya lembaga kesetaraan *gender* (Gene 2022). Presiden Yoon semakin menunjukkan kekuasaannya ketika ia mengutarakan bahwa ia pemimpin yang tepat untuk dipilih masyarakat Republik Korea dengan lantang karena ia berpikir akan memperbaiki kebijakan yang dikritik olehnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden Yoon

ingin memperkuat kekuasaannya sebagai eksekutif dibantik deliberasi politik yang lebih rasional sebagai presiden di negara demokrasi. Presiden Yoon yang tidak memiliki pengalaman sebagai politisi tambah menjadi bukti bahwa ia tidak memiliki pengalaman untuk menjadi wakil rakyat (Britannica 2025).

Pernyataannya selama masa kampanye terlihat berbeda dengan pidato kemenangannya. Presiden Yoon dengan lantang mengatakan bahwa ia sangat mengedepankan demokrasi. Bahkan kata demokrasi diulang berkali-kali di dalam pidatonya. Presiden Yoon mengatakan bahwa kebebasan merupakan nilai universal dan setiap warga negara harus menikmati kebebasan. Presiden Yoon juga mengatakan bahwa perdamaian abadi terjadi ketika hak asasi manusia bersatu. Presiden Yoon bahkan berjanji untuk mengangkat Republik Korea menjadi negara yang benar-benar milik rakyat didasarkan pada pilar kebebasan, hak asasi manusia, keadilan, dan solidaritas (Herald 2022). Namun, dibalik pidato pertamanya sebagai presiden tersebut terdapat banyak kasus-kasus yang malah berbanding terbalik dengan cita-citanya dalam memimpin bangsa. Presiden Yoon malah membuktikan pidato tersebut sebagai omong kosong setelah beberapa kebijakan dan pernyataannya yang dinilai memperkuat kekuasaannya sebagai presiden yang ingin dihormati dan kembali menghidupkan hirarki antara pemimpin dan rakyat.

Pengalaman Presiden Yoon sebagai jaksa membentuk orientasi pemikirannya yang menekankan supremasi hukum. Hal ini tercermin dari pernyataan juru bicaranya, Lee Do-won, yang menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menegakkan tatanan dasar konstitusi. Berdasarkan pandangan tersebut, Presiden Yoon

mengeluarkan sejumlah perintah terhadap praktik ketenagakerjaan yang dinilai tidak berlandaskan konstitusi.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah perintah transparansi keuangan pekerja dengan alasan bahwa pekerja menerima subsidi dari pemerintah, sehingga negara berhak memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara semestinya serta untuk mencegah praktik korupsi di kalangan pegawai. Selain itu, Presiden Yoon juga menyatakan tidak adanya toleransi terhadap tindakan ilegal, termasuk kekerasan di tempat kerja. Oleh karena itu, sejak awal masa kepemimpinannya ia menegaskan bahwa praktik ilegal dalam sektor konstruksi harus segera diberantas. Namun, perintah-perintah tersebut tidak hanya disampaikan dalam bentuk kebijakan, melainkan juga disertai dengan pernyataan bernada merendahkan terhadap pekerja. Presiden Yoon, misalnya, menyebut pekerja sebagai “gangster” dan “korup” yang mencerminkan sikap tidak sopan serta memicu kontroversi dalam implementasi kebijakannya (Mi-na 2023).

Seperti yang terjadi ia menggunakan hak vetonya terhadap beberapa rancangan undang-undang yang diajukan oleh majelis nasional. Rancangan undang-undang yang terkena veto Presiden Yoon diantaranya Rancangan Undang-Undang atas insiden Halloween di Seoul pada Oktober 2022 dan Rancangan Undang-Undang atas campur tangan pemilu, kebocoran informasi rahasia, manipulasi saham, serta Rancangan Undang-Undang lainnya. Salah satu alasan Presiden Yoon menggunakan vetonya adalah untuk melindungi reputasi keluarganya sehingga hal tersebut semakin mempengaruhi bagaimana kekuasaannya berjalan (The Korea Times 2024b). Namun, disamping vetonya yang terus digunakan faktanya suara dan keputusannya memiliki

kekuatan rendah karena partai konservatif kalah dalam kepemimpinan kursi di majelis nasional sehingga Presiden Yoon juga mengalami tekanan terhadap keputusan-keputusannya.

Selama masa kepemimpinan Presiden Yoon, pemimpin majelis nasional merupakan partai demokrat yang menang melalui pemilihan umum. Hal tersebut berdampak terhadap kekuasaan presiden dalam membuat kebijakan maupun keputusan. Presiden Yoon memiliki kesempatan rendah untuk mengesahkan suatu kebijakan jika kebijakannya tidak disetujui oleh majelis nasional. Kesempatan yang semakin ditekan dan Presiden Yoon yang semakin tertekan melabeli majelis nasional sebagai legislatif yang diktator karena banyaknya pendapat dan keputusannya yang ditolak oleh majelis nasional.

Kepemimpinan Yoon yang kaku tidak hanya terlihat di politik domestik Republik Korea namun juga terlihat terhadap kebijakan luar negerinya. Presiden Yoon menyatakan Korea Utara sebagai “musuh utama” karena adanya provokasi nuklir Korea Utara yang dianggap semakin maju dan adanya provokasi militer terhadap Republik Korea. Sebutan musuh terhadap Korea Utara sudah lama diubah-ubah tergantung rezim presiden menjabat, hal tersebut digunakan presiden Republik Korea untuk meningkatkan perdamaian dan untuk memperbaiki citra kepemimpinan masing-masing (Aulia 2023). Pernyataan Presiden Yoon mengarah kepada perilaku Korea Utara yang mengarah kepada ancaman senjata nuklir. Korea Utara semakin meningkatkan kualitasnya dalam persenjataan sehingga hingga sekarang Korea Utara masih enggan untuk berdamai melalui jalur diplomasi. Tidak hanya itu, Korea Utara

juga menghapus reunifikasi dari konstitusi dan melabeli Republik Korea sebagai musuh (Antara News 2024).

Dapat diketahui bahwa sentralisasi kekuasaan seorang pemimpin dapat mempengaruhi arah kebijakan dan arah perilaku suatu negara. Presiden Yoon yang memiliki pengalaman sebagai jaksa menjadikan supremasi hukum untuk menjadi arah kebijakannya. Presiden memiliki kekuatan yang dapat menggoyahkan stabilitas politik sehingga dalam kepemimpinannya Presiden Yoon meningkatkan kekuasaannya untuk memperkuat kontrol eksekutif melalui hukum dan mengeluarkan perintah untuk membersihkan yang dianggapnya menghambat kebutuhan negara. Tidak hanya citranya sebagai jaksa namun praktik Konfusianisme dapat menjadi alasan mengapa Ia dihormati.

Pada bab ini dapat diketahui bahwa tendensi otoritarianisme oleh pemimpin Republik Korea mengalami berbagai perubahan yang cenderung dilakukan oleh presiden dari partai konservatif. Tidak hanya faktor partai konservatif maupun otoriter, namun nilai-nilai Konfusianisme juga menjadi faktor utama sentralisasi kekuasaan oleh pemimpin Republik Korea. Adanya hirarki yang mengakar dalam masyarakat menjadikan posisi presiden dipandang sebagai otoritas yang sulit untuk dikritik dan dicapai sehingga membuka ruang bagi kebijakan yang cenderung memanfaatkan kekuasaan sepihak.

### **BAB III**

#### **KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN DEKLARASI DARURAT MILITER**

##### **PRESIDEN YOON SEOK-YEOL**

Sentralisasi Kekuasaan yang berakhir pada perluasan kekuasaan akan menimbulkan krisis akuntabilitas oleh presiden seperti yang dijelaskan pada teori *Executive Aggrandizement* oleh Tarunabh Khaitan. Khaitan menyatakan melalui teori tersebut bahwa otoritas eksekutif tertinggi cenderung dapat menjadi cabang yang berbahaya bagi kelangsungan masa depan negara. Krisis akuntabilitas oleh pemimpin eksekutif dapat menyebabkan krisis konstitusionalisme demokrasi liberal yang akan berdampak terhadap negara demokratis (Khaitan 2019).

Dalam krisis akuntabilitas tersebut, eksekutif dapat memicu krisis sehingga fungsi utamanya dalam menjaga ketertiban negara dapat tergerus. Khaitan menjelaskan bahwa krisis akuntabilitas dapat berupa akuntabilitas vertikal dan horizontal. Krisis akuntabilitas vertikal merupakan krisis pertanggungjawaban oleh pemerintah terhadap rakyat dimana rakyat dapat mengkritik dan mengganti pemimpin untuk mempertahankan demokrasi. Sedangkan, akuntabilitas horizontal dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban eksekutif terhadap lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam akuntabilitas horizontal, lembaga-lembaga negara melakukan pengawasan ketika pemimpin eksekutif melemahkan kontrol negara seperti mengabaikan mekanisme *check and balances* yang dilakukan oleh Presiden Yoon Seok-yeol dalam melakukan veto terhadap rancangan undang-undang (Khaitan 2019).

Krisis akuntabilitas tersebut mencerminkan adanya krisis konstitusional dalam demokrasi liberal yang ditandai dengan adanya pola sistematis yang melemahkan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pola sistematis tersebut dirancang untuk mengontrol konstitusional oleh pemimpin eksekutif. Dalam hal ini deklarasi darurat militer menjadi contoh adanya krisis konstitusional yang berpotensi melemahkan demokrasi liberal. Dalam konteks pemerintahan Presiden Yoon, pola tersebut sudah terlihat sejak awal menjabat melalui berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip negara demokrasi berjalan. Hal tersebut dilakukan Presiden Yoon karena terbatasnya kekuasaannya sebagai anggota partai konservatif yaitu Partai Kekuatan Rakyat dari dominasi partai oposisi yaitu Partai Demokrasi di Majelis Nasional (Hyung-Jin 2024).

### **3.1 *Inkrementalisme***

*Inkrementalisme* merupakan proses dimana pemimpin eksekutif melemahkan konstitusi dengan cara merubah konstitusi dari dalam sehingga menyebabkan kemunduran demokrasi yang tersistematis serta dapat menyebabkan krisis terhadap akuntabilitas pemimpin (Khaitan 2019). Dalam hal ini Presiden Yoon Seok-yeol melakukan pelemahan konstitusi melalui pelanggaran prinsip *check and balance* Republik Korea yang sebelumnya sudah dibedakan antara lembaga politik dan lembaga penegak hukum (Hyo-sang 2022). *Check and balance* dapat terganggu jika lembaga-lembaga institusi tersebut diisi oleh orang-orang dengan perspektif dan latar belakang yang tidak sesuai karena dapat berakibat pada pengambilan keputusan.

Pada kasus tersebut terjadi oleh Presiden Yoon Seok-yeol, di mana ia melakukan nepotisme<sup>3</sup> di dalam kursi penting pemerintahan. Orang-orang yang termasuk dalam nepotisme tersebut diantaranya Lee Bok-hyun (Gubernur Lee) yang merupakan mantan Kepala Jaksa yang diangkat menjadi Gubernur Pertama Badan Pengawas Keuangan. Naiknya Gubernur Lee di Badan Pengawas Keuangan tersebut menciptakan sejarah karena pertama kalinya seorang mantan jaksa menjadi Gubernur Badan Keuangan. Kemudian, Cho Sang-joon merupakan mantan Kepala Kantor Kejaksaan yang diangkat sebagai Direktur Perencanaan di Badan Intelijen Nasional. Mantan jaksa sekaligus Pengacara Lee Wan-kyu yang merupakan pembela Presiden Yoon pada masa Ia diskors dari jabatan Jaksa Agungnya diangkat menjadi Menteri Legislasi Pemerintah. Kemudian, Pengacara sekaligus Mantan Hakim Lee Sang-min yang diangkat menjadi Pengawas Kepolisian Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan. Mantan Jaksa Kang Soo-jin diangkat menjadi Ketua Komisi Perdagangan Adil. Lee Noh-kong teman dekat Presiden Yoon ketika masih bekerja di Kantor Kejaksaan Distrik Suwon diangkat menjadi Wakil Menteri Kehakiman. Terakhir, Han Dong-hoon yang memiliki campur tangan terhadap pengangkatan seluruh Mantan Jaksa dan Mantan Hakim tersebut yang dulunya juga Mantan Jaksa yang kemudian diangkat menjadi Menteri Kehakiman (Hyo-sang 2022).

Ketujuh orang tersebut diangkat Presiden Yoon melalui Menteri Kehakiman Han Dong-hoon sehingga ketujuh menteri tersebut diangkat sebagai bagian dari kekuasaan Presiden Yoon. Mereka mengambil alih fungsi-fungsi penting di dalam

---

<sup>3</sup> Nepotisme menurut KBBI adalah tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

pemerintahan. Dalam pengangkatan mantan jaksa dan mantan hakim tersebut dapat dilihat bahwa kedekatan hubungan dengan Presiden Yoon menyebabkan terciptanya nepotisme di Republik Korea sehingga dapat mengakibatkan pelemahan politik internal. Nepotisme di dalam negara demokrasi termasuk dalam hal yang tidak profesional karena dapat menyebabkan krisis akuntabilitas Presiden Yoon (Wong and Kleiner 1994). Maka dari itu, nepotisme disini mempengaruhi sistem konstitusi Republik Korea yang dapat memicu kebijakan lebih besar di masa mendatang.

Tidak hanya menempatkan orang-orang dengan pengalaman kerja yang sama dengan Presiden Yoon, namun Ia juga memasukkan orang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kebijakan yang telah dikampanyekan. Orang tersebut adalah Kim Moon-soo yang merupakan mantan Ketua Ekonomi, Sosial, dan Ketenagakerjaan yang dicalonkan oleh Presiden Yoon untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Pencalonan Kim Moon-soo tersebut menuai kontroversi terutama oleh Majelis Nasional karena Ia merupakan menteri yang menyanggah mengenai pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye. Penyangkalan tersebut Ia unggah di media sosialnya dan tidak menghapus unggahan tersebut ketika Ia dicalonkan menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Jeong-woo 2024). Perbuatannya tersebut menjadi kontroversi karena dianggap menyangkal prosedur konstitusional karena penyangkalannya tidak masuk akal untuk membela seseorang yang sudah mencederai kepercayaan publik. Namun, penolakan terhadap pencalonan tersebut tidak menghentikan Presiden Yoon untuk menjadikan Kim Moon-soo sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Pencalonan Kim Moon-soo hingga Ia menjadi Menteri Ketenagakerjaan melatarbelakangi alasan Presiden Yoon untuk melancarkan janji kampanyenya

mengenai penambahan jam kerja bagi pekerja di Republik Korea. Selain campur tangan Presiden Yoon terhadap Kementerian Ketenagakerjaan, Ia juga melakukan campur tangan terhadap Kementerian Kesetaraan *Gender* dengan menjanjikan akan menghapus kementerian tersebut. Presiden Yoon sudah menjanjikan penghapusan Kementerian Kesetaraan *Gender* tersebut sejak awal masa kampanye presidennya dan berhasil menggaet suara dari kalangan laki-laki generasi muda (Tokyo, and McCurry 2022).

Pencalonan Menteri Kim Moon-soo dan janji penghapusan Kementerian Kesetaraan *Gender* tersebut merupakan upaya yang dapat mencederai konstitusi karena adanya pengaruh kekuasaan terhadap pencalonan menteri. Majelis Nasional sebagai pengawas *check and balances* sudah menolak calon Menteri Kim Moon-soo dan penghapusan Kementerian tersebut namun Presiden Yoon tetap melakukan hal tersebut demi kepentingannya.

Upaya penghapusan Kementerian juga menjadi suatu hal yang dapat mencederai demokrasi dan konstitusi Republik Korea karena adanya pelanggaran Konstitusi *Article* 11 ayat 1<sup>4</sup> mengenai diskriminasi terhadap wanita dan penghapusan kementerian itu sendiri dilakukan melalui prosedur yang panjang yang dapat mengubah sistem pemerintahan Republik Korea (kumparanNews 2022). Tidak berhenti sampai pada kebijakan tersebut namun Presiden Yoon juga berupaya memveto kebijakan yang diajukan Majelis Nasional.

---

<sup>4</sup> Korea (Republic of) 1948 (Rev. 1987) *Article* 11 ayat 1: seluruh warga negara berhak atas kesetaraan di hadapan hukum, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial ataupun budaya atas dasar jenis kelamin, agama ataupun status sosial.

Veto kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Yoon tersebut dilakukan karena adanya kebijakan yang akan merugikan citra Presiden Yoon sebagai Kepala negara. Kebijakan yang diveto oleh Presiden Yoon adalah kebijakan mengenai penerbitan kupon mata uang lokal untuk mendorong perputaran uang terhadap usaha lokal di Republik Korea. Namun, kebijakan yang diajukan oleh Majelis Nasional tersebut di veto oleh Presiden Yoon untuk melindungi citranya (The Korea Times 2024b). Maka dari itu dapat dipahami bahwa perilaku Presiden Yoon tersebut menyebabkan upaya *inkrementalisme* melalui pemanfaatan sentralisasi kekuasaan.

Dalam *inkrementalisme* yang dilakukan Presiden Yoon dapat dilihat bahwa adanya proses pelemahan konstitusi dari dalam yang dilakukan secara bertahap sejak awal Ia menjabat sebagai Presiden. Upaya nepotisme dan penghapusan kementerian yang mengabaikan pertimbangan Majelis Nasional. Pertimbangan Majelis Nasional dianggap sebagai hal yang menekan kebijakan Presiden Yoon karena kebijakan yang cenderung ditolak oleh Majelis Nasional (Frances and Jake 2024). Maka dari itu, Presiden Yoon menciptakan fenomena lebih besar yaitu deklarasi darurat militer yang menjadi titik puncak kemunduran demokrasi karena Majelis Nasional sebagai salah satu syarat pelaksanaannya tidak dilibatkan dalam fenomena besar tersebut.

Dalam deklarasi darurat militer tersebut Presiden Yoon melemahkan Majelis Nasional dalam melaksanakan tugasnya dan menuduh anggota Majelis Nasional sebagai kekuatan anti-negara. Ia mengatakan bahwa partai oposisi dapat melemahkan sistem konstitusi Republik Korea dalam menjalankan sistem demokrasi sehingga dapat melemahkan negara dalam bertindak. Tindakan pemakzulan yang melibatkan dirinya dan beberapa anggota parlemen yang berada dibawah naungan Partai Kekuatan Rakyat

memicu dugaan bahwa Partai Demokrat ingin menutupi kasus yang melibatkan anggota partainya, sehingga memicu pernyataan oleh Presiden Yoon bahwa hal tersebut dapat menjadi penghancur tatanan konstitusi yang dapat menghambat urusan negara dan mengakibatkan krisis nasional (Vitale and Chang 2013).

Selain itu, alasan utama adanya deklarasi tersebut adalah Presiden Yoon menganggap adanya mata-mata asing anti-negara di Majelis Nasional yang dimulai dari dugaan Majelis Nasional yang tidak merespon mengenai adanya penyelundup dari Tiongkok yang melakukan pengintaian di wilayah markas tentara Amerika Serikat dan menolak intervensi Presiden Yoon. Penolakan oleh Majelis Nasional tersebut memicu Presiden Yoon untuk membenarkan tindakan darurat militernya walaupun pemerintah Tiongkok sudah membantah adanya klaim pengintaian tersebut (Ji-eun 2024).

Pembenaran adanya darurat militer tidak hanya atas tuduhan Presiden Yoon terhadap pembelaan Majelis Nasional kepada Tiongkok namun juga adanya pembelaan yang dilakukan kepada provokasi nuklir Korea Utara. Majelis Nasional dianggap kurang tegas dalam menanggapi adanya provokasi nuklir tersebut sehingga memicu anggapan adanya seorang anti-negara pro-Utara didalam kursi Majelis Nasional. Namun, Presiden Yoon tidak mengatakan bahwa Majelis Nasional menunggu sikap PBB untuk menghadapi provokasi nuklir tersebut karena Majelis Nasional tidak ingin menjadi pihak yang memutuskan sanksi terhadap tindakan Korea Utara karena dapat memicu konflik yang serius (Tirtalaksana, Hardiwinoto, and Idris 2016). Respon Majelis Nasional yang kurang tegas dan dianggap membela kekuatan anti-negara tersebut membuat Presiden Yoon melakukan darurat militer dengan dalih melindungi

konstitusi negara serta untuk melindungi kebebasan, demokrasi, dan konstitusi terhadap penguasaan diktator.

### **3.2 Retorika Demokrasi**

Retorika demokrasi sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah tuduhan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. *Executive aggrandizement* menyatakan bahwa demokrasi tidak hanya dijalankan melalui prosedur, tetapi juga dibentuk dan dipertahankan melalui retorika politik (Khaitan 2019). Dalam kajian retorika demokrasi, Presiden Yoon mengatakan bahwa akan membangun bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi liberal dan memastikan bahwa negara Republik Korea benar-benar milik rakyat (The Korea Times 2022). Namun, hal tersebut menjadi kontradiktif pada masa Ia menjabat sebagai Presiden.

Puncak strategi atas nama demokrasi yang dilakukan Presiden Yoon adalah terjadinya deklarasi darurat militer. Dalam hal ini retorika demokrasi akan menjadi analisis utama dalam penelitian ini. Deklarasi darurat militer tersebut terjadi dengan dalih oleh Presiden Yoon untuk melindungi kepentingan nasional dan melindungi dari kekuatan anti-negara. Dapat dilihat seluruh isi deklarasi tersebut dari pembukaan, isi, hingga penutup merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dalam sistem parlemen Republik Korea. Pembukaan deklarasi tersebut menyebutkan bahwa deklarasi ini dibuat atas dasar “untuk melindungi demokrasi liberal....” namun isi dari deklarasi tersebut menjadi kontradiktif ketika ada isi yang menyatakan larangan aktivitas politik hingga demonstrasi dan adanya ketentuan pembatasan kendali media dan publikasi.

Tidak hanya isi yang kontradiktif dengan prinsip demokrasi namun adanya hukuman militer bagi pembelot deklarasi tersebut yang tercantum pada akhir paragraf sehingga menyebabkan kritik dari Majelis Nasional dan demonstrasi dari rakyat. Walaupun deklarasi tersebut berhasil digagalkan oleh Majelis Nasional dengan alasan tidak sesuai dengan konstitusi Republik Korea mengenai faktor diadakannya darurat militer (Korean Constitution, n.d.). Selain itu, tidak ada kepentingan nasional yang menjadi alasan diadakannya darurat militer sehingga dilakukan pembatalan dan memicu lemahnya akuntabilitas Presiden Yoon sebagai pemangku kepentingan rakyat.

Penggagalan darurat militer tersebut menjadi pemicu untuk Majelis Nasional memakzulkan Presiden Yoon atas dasar adanya ketidakstabilan politik dan domestik. Namun upaya pemakzulan dan pembatalan darurat militer tersebut tidak menghalangi Presiden Yoon untuk membenarkan tindakannya dan berusaha mempengaruhi rakyat untuk membenarkan tindakan tersebut. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai pidato yang disampaikan oleh Presiden Yoon terhadap penggunaan demokrasi sebagai alasan melakukan darurat militer.

Partai Demokrat menjadi satu-satunya alasan bagi Presiden Yoon untuk melakukan darurat militer karena dianggap menghambat Presiden Yoon dalam menciptakan keputusan dan adanya tuduhan anti-negara kepada Partai Demokrat sebagai partai oposisi. Presiden Yoon mengatakan dengan tegas bahwa darurat militer tersebut dilakukan atas kewenangannya sebagai Presiden untuk melindungi negara dan melancarkan urusan negara dalam menangani darurat yang dilakukan oleh kekuatan anti-negara serta ancaman sekutu Korea Utara sehingga keadaan darurat militer

memang merupakan tindakan yang harus dilakukan. Penutupan pidatonya ditutup dengan janji akan berjuang atas nama rakyat namun dalam prakteknya juga terdapat kontradiktif karena adanya pelanggaran wewenang eksekutif dalam bertindak. Bahkan deklarasi tersebut menuai penolakan dari berbagai termasuk Partai Kekuatan Rakyat karena Presiden Yoon mengeluarkan deklarasi tanpa diskusi (He-suk 2024).

Deklarasi darurat militer dan pidato pemakzulannya yang mengatasnamakan demokrasi dan kepentingan nasional yang dilakukan oleh Presiden Yoon menandakan adanya retorika demokrasi yang sudah mengakar sejak Presiden Yoon memiliki jabatan presiden. Adanya indikasi terhadap pidato Presiden Yoon yang membuktikan adanya pemimpin yang memanfaatkan demokrasi untuk menyerang demokrasi itu sendiri dengan klaim melindungi kepentingan rakyat. Hal tersebut menyebabkan adanya pelemahan akuntabilitas eksekutif terhadap kalimat yang dinyatakan sehingga membuat kebingungan politik baik di parlemen maupun di ranah publik.

Demokrasi yang diutarakan oleh Presiden Yoon tidak hanya dilakukan pada saat deklarasi darurat militer dikeluarkan namun hal tersebut sudah ada sejak awal Ia menjabat sebagai presiden. Seperti adanya rencana penciptaan Undang-Undang penambahan jam kerja yang sebelumnya 52 jam menjadi 69 jam yang kontroversial dengan alasan mengutamakan kesehatan wanita dan tanggung jawab keluarga. Namun hal tersebut menuai kontroversi karena rakyat menganggap hal tersebut malah mengganggu kesehatan dan fokus dalam bekerja. Walaupun rakyat sudah melakukan protes tersebut, Presiden Yoon tetap melakukan perubahan jam kerja karena jam kerja pada masa Presiden Yoon dianggap longgar. Selain itu, penghapusan Kementerian Kesetaraan *Gender* juga menjadi isu bagi gerakan feminisme di Republik Korea karena

gerakan tersebut dianggap alasan utama angka kelahiran rendah di Republik Korea (Vitale and Chang 2013).

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perlindungan kepentingan nasional dan ancaman anti-negara digunakan oleh Presiden Yoon untuk melemahkan demokrasi di Republik Korea. Tidak adanya alasan yang tepat untuk deklarasi, kebijakan yang tetap diciptakan walaupun dikritik oleh rakyat, dan kritik terhadap gerakan feminisme menjadi hal utama bagaimana demokrasi di Republik Korea mengalami kecacatan.

### **3.3 *Sistemicity***

*Sistemicity* merupakan pola dari kumpulan kemunduran demokrasi yang terjadi. Pola tersebut terjadi bukan hanya karena satu tindakan namun karena adanya rangkaian kemunduran demokrasi. Pola yang terjadi ini membentuk rangkaian yang tersistematis dan bersifat mengancam bagi demokrasi suatu negara. Rangkain dari pola-pola tersebut dimulai dari pelemahan konstitusi dari dalam yang digunakan untuk menghindari respon negatif oleh masyarakat maupun parlemen, namun pada akhirnya hal ini menciptakan respon kritik karena adanya efek yang lebih besar terhadap tatanan demokrasi (Khaitan 2019).

Dalam hal ini dapat dipahami yang dilakukan oleh Presiden Yoon Seok-yeol menunjukkan pola *inkrementalisme* dan retorika demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan-nya sebagai Presiden yang berada dalam tekanan politik. Pola tersebut kemudian menghasilkan kemunduran demokrasi yang bersifat sistematis melalui serangkaian kebijakan dan praktik politik yang saling berkaitan serta terakumulasi secara bertahap sehingga perlahan menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Berbagai langkah seperti upaya nepotisme di kursi pemerintahan, penambahan jam kerja yang

dikritik masyarakat, dan kritik terhadap gerakan feminisme hadir sebagai rangkaian pola kebijakan yang secara konsisten menggerus demokrasi di Republik Korea. Akumulasi dari langkah-langkah tersebut pada akhirnya mengarah pada fenomena yang lebih serius, yaitu deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024 di Republik Korea.

Deklarasi tersebut menjadi fenomena yang menggemparkan masyarakat domestik hingga mancanegara karena deklarasi darurat militer dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam maupun luar negeri. Dalam kerangka konstitusional, ketentuan mengenai pernyataan deklarasi darurat militer sudah tercantum dalam Konstitusi Republik Korea 1948 (Rev. 1987) *Article 77*<sup>5</sup> di mana harus ada campur tangan Majelis Nasional dalam pelaksanaan deklarasi. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai puncak akumulasi dari krisis akuntabilitas dan pencederaan konstitusional yang sebelumnya sudah berkembang melalui berbagai kebijakan eksekutif. Dengan begitu, maka deklarasi darurat militer tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari proses pelemahan institusi demokrasi yang berlangsung secara bertahap dan sistematis.

Pola kemunduran demokrasi dapat juga dilihat melalui kebijakan lain yang muncul dalam kerangka *inkrementalisme*. Dalam *sistemicity*, kebijakan-kebijakan

---

<sup>5</sup> 1. Korea (Republic of) 1948 (rev. 1987) Article 77 (ayat 1, 4, dan 5): 1. Apabila diperlukan untuk mengatasi kebutuhan militer atau untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan mengerahkan pasukan militer pada masa perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat nasional serupa, Presiden dapat mengumumkan keadaan darurat militer sesuai dengan ketentuan undang-undang; 4. Apabila Presiden telah mengumumkan keadaan darurat militer, ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Nasional tanpa penundaan; 5. Apabila Majelis Nasional meminta pencabutan keadaan darurat militer dengan suara bulat mayoritas anggota Majelis Nasional, Presiden wajib menaati permintaan tersebut.

tersebut dipahami sebagai rangkaian langkah kebijakan yang secara bertahap memengaruhi struktur institusional dalam sistem politik. Di mana Presiden Yoon berjanji akan menghapus Kementerian Kesetaraan *Gender* yang digunakan untuk menarik dukungan suara laki-laki generasi muda. Padahal penghapusan kementerian dapat mengubah tatanan sistem politik dan kebijakan di parlemen serta dampak yang signifikan dapat terjadinya ketidaksesuaian prinsip demokrasi yang sudah ada di Republik Korea. Pentingnya keberadaan kementerian ini menunjukkan bahwa perubahan terhadap lembaga institusi dapat berpotensi memengaruhi kerangka kebijakan yang selama ini menopang perlindungan hak-hak perempuan serta dapat berpengaruh ke tatanan sistem parlemen Republik Korea hingga menuai respon Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Respon dari upaya ini menjadi serius karena kekosongan jabatan Kepala Kementerian yang tidak kunjung diisi oleh Presiden Yoon (Da-hyun 2024).

Komite PBB memberi pernyataan bahwa penghapusan kementerian tersebut dapat berdampak pada polarisasi dan penurunan prioritas terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang sudah dirancang untuk didedikasikan kepada kemajuan hak-hak perempuan sehingga penghapusan akan berdampak pada kemunduran prinsip yang sudah ditandatangani oleh Republik Korea pada 1984 dan yang tercantum dalam Konstitusi *Article* 11 ayat 1 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya memengaruhi satu lembaga negara, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan normatif Republik Korea terhadap perlindungan hak perempuan. Penghapusan kementerian ini tidak hanya sampai kementerian dihapus namun kementerian tersebut akan dipindah

tugaskan kepada badan kementerian baru yang dijanjikan oleh Presiden Yoon yaitu Kementerian Strategi Kependudukan (Hyo-jin 2024).

Presiden Yoon menyatakan bahwa masalah utama Republik Korea pada saat itu adalah angka kelahiran rendah sehingga Ia membentuk Kementerian Strategi Kependudukan untuk berfokus pada penanganan angka kelahiran rendah bersamaan dengan mengambil alih Kementerian Kesetaraan *Gender* (Ji-won 2024). Namun, hal itu menunjukkan bahwa kementerian baru tersebut menjadi sebuah bukti adanya praktik “anti-feminis” yang dilakukan oleh Presiden Yoon karena Ia berupaya menghapus kementerian yang dapat melindungi perempuan namun malah memberdayakan perempuan melalui perspektif meningkatkan angka kelahiran. Banyaknya generasi muda laki-laki yang menjadi pendukung Presiden Yoon hingga Ia memenangkan kursi presiden menjadi bukti bahwa hak-hak perempuan masih harus diperjuangkan. Dalam hal itu PBB juga mengatakan bahwa adanya kepentingan untuk memperluas kebijakan yang ditujukan kepada perempuan untuk mendapatkan haknya lebih baik daripada membubarkan kementerian tersebut (Da-hyun 2024).

Selain perubahan institusional, pola pelemahan demokrasi juga terlihat dalam penempatan figur politik yang memiliki kedekatan dengan presiden dalam jabatan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan dalam lingkaran eksekutif yang dapat memengaruhi institusi negara. Pada saat yang sama ambisinya saat kampanye untuk penambahan jam kerja menjadi kontroversi karena berpotensi mengganggu kesehatan pekerja di Republik Korea (Yim 2023). Penghapusan kementerian maupun penunjukkan pejabat tertentu tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif semata. Kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan

perubahan institusional, penyesuaian sistem birokrasi, serta reorganisasi kewenangan antar lembaga negara. Jika berbagai kebijakan tersebut terjadi secara berulang, maka akan terbentuk akumulasi perubahan yang secara sistematis memengaruhi keseimbangan dalam sistem politik. Langkah-langkah yang muncul secara berulang tersebut menyebabkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang berpotensi mengikis mekanisme *check and balance*. Dengan demikian, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan adanya proses pelemahan demokrasi yang bersifat sistemik karena memengaruhi struktur kelembagaan serta tata kelola kekuasaan dalam jangka panjang.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pelemahan konstitusi dan kemunduran demokrasi dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara sistematis dan terakumulasi, bukan sebagai fenomena yang terjadi secara tiba-tiba. Serangkaian kebijakan Presiden Yoon membentuk pola yang saling berkaitan secara bertahap hingga menyebabkan kemunduran demokrasi. Pola ini kemudian menghasilkan kondisi yang memungkinkan tindakan atau fenomena yang lebih ekstrim, seperti deklarasi darurat militer. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Khaitan bahwa bahaya utama dari *executive aggrandizement* terletak pada akumulasi tindakan eksekutif yang mengikis prinsip demokrasi. Proses yang terjadi tersebut seringkali berlangsung dalam sistem secara formal di pemerintahan (Khaitan 2019).

*Executive Aggrandizement* yang dilakukan Presiden Yoon terutama pada prinsip retorika demokrasi memicu ketegangan politik sehingga dapat melemahkan tatanan demokrasi. Pidato dan kebijakan yang diciptakan oleh Presiden Yoon menjadi kumpulan dari kemunduran demokrasi yang tersistematisasi. Deklarasi darurat militer

menjadi puncak Presiden Yoon memperluas kekuasaannya dengan mengerahkan kekuatan militer dengan alasan keamanan kepentingan nasional. Akibat dari *Executive Aggrandizement* tersebut merupakan penangkapan yang terjadi pada 15 Januari 2025 setelah Presiden Yoon berusaha membenarkan tindakan darurat militernya dan dijatuhi tuntutan penjara 5 tahun dengan dakwaan pemberontakan setelah sebelumnya dijatuhi tuntutan vonis mati oleh Mahkamah Konstitusi Republik Korea (BBC News Indonesia, 2025).

Dengan demikian pola dari *executive aggrandizement* ini merupakan pola dari perluasan kekuasaan Presiden Yoon dalam tatanan konstitusi demokrasi liberal. Demokrasi yang mengalami kemunduran dapat mengakibatkan situasi yang serius bagi negara demokratis. Kemunduran yang terjadi perlahan melahirkan fenomena besar yang menjadi titik akhir kemunduran demokrasi dilakukan. Deklarasi darurat militer menjadi titik akhir bagi Presiden Yoon dalam melemahkan demokrasi di Republik Korea. Deklarasi tersebut dilakukan pada masa akhir pemerintahannya namun menciptakan gejolak besar bagi sistem pemerintahan Republik Korea karena adanya campur tangan militer yang dapat menimbulkan rezim otoriter kembali setelah 64 tahun sejak rezim otoriter lahir di Republik Korea.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Yoon Seok-yeol pada 3 Desember 2024 merupakan deklarasi yang dilakukan tanpa persetujuan Majelis Nasional Republik Korea. Deklarasi tersebut memiliki isi kontradiktif dengan demokrasi Republik Korea. Republik Korea sebagai negara demokrasi memiliki prinsip bahwa sistem *check and balance* harus ditegakkan sehingga tidak adanya tugas yang tumpang tindih antara lembaga politik dan lembaga penegak hukum. Namun pada deklarasi darurat militer ini sistem *check and balance* mengalami *error* karena Presiden Yoon tidak melaporkan deklarasi darurat militer ke Majelis Nasional.

Sebelum adanya deklarasi tersebut, Presiden Yoon sudah melakukan pelemahan konstitusi yang dilakukan secara bertahap sehingga menyebabkan kemunduran demokrasi yang tersistematisasi dari dalam. Kemunduran demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Yoon diantara adalah kebijakan perubahan jam kerja, penghapusan Kementerian *Gender*, dan veto kebijakan. Hal tersebut dilakukan Presiden Yoon karena adanya ketertekanan kekuasaan oleh partai oposisi. Dapat diketahui bahwa Majelis Nasional didominasi oleh Partai Demokrat sebagai partai oposisi Presiden Yoona sehingga terdapat perbedaan pandangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus ini Presiden Yoon menyebutkan bahwa adanya kekuatan anti-negara Pro-Utara yang ada di kursi Majelis Nasional sehingga deklarasi darurat militer

harus dilakukan untuk melindungi keamanan nasional dan ancaman anti-negara tersebut. Presiden Yoon menuduh Majelis Nasional sebagai kekuatan anti-negara karena respon Majelis Nasional terhadap provokasi militer Korea Utara dan reaksi terhadap mata-mata Tiongkok yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Yoon. sehingga hal tersebut digunakan oleh Presiden Yoon untuk membenarkan tindakannya tersebut.

Pola yang tersistematisasi dilakukan oleh Presiden Yoon untuk melindungi kekuasaannya sehingga menyebabkan akuntabilitasnya sebagai pemimpin dipertanyakan. Krisis akuntabilitas yang dialami oleh Presiden Yoon ini diakibatkan oleh perluasan kekuasaan yang mengganggu konstitusional Republik Korea. Maka dari itu, *Executive Aggrandizement* menjadi teori yang digunakan untuk menganalisis karena adanya upaya *inkrementalisme* melalui nepotisme seperti penempatan jaksa dikursi parlemen dan pengangkatan Kim Moon-so sebagai Kepala Kementerian. Adanya juga upaya retorika demokrasi yang dilakukan pada pidato kepresidenannya yang mengatakan bahwa Presiden Yoon akan membangun bangsa negara demokratis. Upaya retorika demokrasi juga dilakukan dalam deklarasi darurat militer dimana pada pembukaan Presiden Yoon mengatakan bahwa deklarasi ini dilakukan untuk melindungi kepentingan negara demokrasi. Sehingga rangkaian *inkrementalisme* dan retorika demokrasi tersebut menjadi pola tersistematis yang dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi yang ada di Republik Korea.

#### **4.2 Rekomendasi**

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang masih baru dan belum selesai sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tuntutan yang diberikan

kepada Presiden Yoon Seok-yeol yang akan dibacakan pada bulan Februari 2026. Peneliti selanjutnya dapat menjelaskan kembali dampak tuntutan tersebut terhadap hubungan pemimpin dengan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Antara News. 2024. “Kim Jong-un kembali nyatakan Korsel sebagai musuh utama Pyongyang.” Indonesia. *Antara News*, February 9, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/3955581/kim-jong-un-kembali-nyatakan-korsel-sebagai-musuh-utama-pyongyang>.
- Aulia, Luki. 2023. *Korsel Kembali Sebut Korut Sebagai “Musuh.”* February 17, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/korsel-kembali-sebut-korut-sebagai-musuh>.
- Baker, Edward J. 2014. *Kim Dae-Jung’s Role in the Democratization of South Korea*. 2014.
- BBC News*. 2017. “Park Geun-Hye: How Identity Politics Fuelled South Korean Scandal.” Asia. March 10, 2017. <https://www.bbc.com/news/world-asia-39228815>.
- BBC News Indonesia*. 2018. “Apa yang membuat mantan Presiden Republik Korea Park Geun-hye dipenjara selama 24 tahun?” April 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43618151>.
- . 2025. “Republik Korea: Mahkamah Konstitusi putusan pemakzulan Presiden Yoon terkait dekrit militer, apa artinya bagi Korsel?” April 4. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2evvgxnreo>.
- Bermeo, Nancy. 2016. “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy*, 2016. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/on-democratic-backsliding/>.
- Britannica. 2025. “Democratic Party of Korea (DP) | History & Members | Britannica.” November 29. <https://www.britannica.com/biography/Roh-Moo-Hyun>.
- Cornell Law School. n.d. “Martial Law.” LII / Legal Information Institute. Accessed March 5, 2026. [https://www.law.cornell.edu/wex/martial\\_law](https://www.law.cornell.edu/wex/martial_law).
- Dae-jung, Kim. 1994. “Is Culture Destiny? The Myth of Asia’s Anti-Democratic Values.” *Foreign Affairs* 73 (6): 189–94. <https://doi.org/10.2307/20047005>.

Da-hyun, Jung. 2024. *UN urges swift appointment of gender equality minister in Korea - The Korea Times*. Southkorea. June 4, 2024. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20240604/un-urges-korea-to-expedite-appointment-of-gender-equality-minister>.

Fleckenstein, Timo, and Soohyun Christine Lee. 2025. "What Has Happened to the Poster Child: Is South Korean Democracy Backsliding?" *Journal of Contemporary Asia*, October 21, 2025. <https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/130943/>.

Frances, Mao, and Kwon Jake. 2024. "Republik Korea: Mengapa Presiden Korsel tiba-tiba mengumumkan darurat militer lalu mencabutnya?" *BBC News Indonesia*, December 4, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce32wjp7wl3o>.

Gene, MacKenzie. 2022. "Perempuan Korea berjuang melawan penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga." *BBC News* [www.bbc.com/korean/features-64016034](https://www.bbc.com/korean/features-64016034), December 18, 2022. <https://www.bbc.com/korean/features-64016034>.

Gi-wook, Shin. n.d. "What Happened to South Korea's Democracy?" *Journal of Democracy*. Accessed March 3, 2026. <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/what-happened-to-south-koreas-democracy/>.

Hall, Rowan. 2025. "Sistem pengawasan dan keseimbangan: apa itu dan mengapa penting? | Fakultas Ilmu Sosial & Sejarah UCL." <https://www.ucl.ac.uk/social-historical-sciences/constitution-unit/constitution-unit-publications/constitution-unit-briefings/checks-and-balances-what-are-they-and-why-do-they-matter>.

Heo, Uk, and Sung Deuk Hahm. 2014. "Political Culture and Democratic Consolidation in South Korea." *Asian Survey* 54 (5): 918–40. <https://doi.org/10.1525/as.2014.54.5.918>.

Herald, Korea. 2022. "Full text of President Yoon Suk-yeol's inauguration speech." *The Korea Herald*, May 10. <https://www.koreaherald.com/article/2861284>.

He-suk, Choi. 2024. "Full text of South Korean President Yoon Suk Yeol's address to the nation on Thursday." *The Korea Herald*, December 12. <https://www.koreaherald.com/article/10016987>.

Hyo-jin, Lee. 2024. *Proposal to abolish gender equality ministry reemerges as key issue ahead of elections - The Korea Times*. Southkorea. February 23, 2024. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20240223/proposal-to-abolish-gender-equality-ministry-reemerges-as-key-issue-ahead-of-elections>.

Hyo-sang, Lee. 2022. “Yoon Suk-yeol’s People Everywhere: Prosecutors and Investigators Galore as Former Prosecutors Take over Key Positions.” English. *경향신문*, June 8, 2022. <https://www.khan.co.kr/en/article/202206081638237>.

Hyung-Jin, Kim. 2024. “Why Did Yoon’s Party Lose in South Korea’s Elections and What Troubles Does He Face Now?” AP News, April 11. <https://apnews.com/article/south-korea-election-president-yoon-76d0d61593c9ab85504bcf4b66c2c168>.

I-hyun, Kang, and Yang Jin-bi. 2008. “The law that created Park Chung-hee and supported Lee Myung-bak?” May 28. <https://www.pressian.com/pages/articles/88937>.

International Crisis, Group. 2018. *Seoul’s Shifting Calculations*. The Korean Peninsula Crisis (I): International Crisis Group. <https://www.jstor.org/stable/resrep31404.7>.

Jeong-woo, Kim. 2024. “Partai Demokrat: ‘Presiden Yoon harus mencabut pencalonan Kim Moon-soo sebagai Menteri Tenaga Kerja.’” 정치. *MBC 뉴스*, August 5, 2024. [https://imnews.imbc.com/news/2024/politics/article/6624051\\_36431.html](https://imnews.imbc.com/news/2024/politics/article/6624051_36431.html).

Ji-eun, Seo. 2024. *China opposes “unfounded” espionage claims by Yoon during public address*. December 13, 2024. <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-12-13/national/diplomacy/China-opposes-unfounded-espionage-claims-by-Yoon-during-public-address/2200039>.

Ji-won, Choi. 2024. “Korea declares full-fledged war to combat low birth rate.” The Korea Herald. *The Korea Herald*, June 19, 2024. <https://www.koreaherald.com/article/3418876>.

Kang, David C. 2017. “A New President Aims to Change South Korea’s Course.” *Current History* 116 (791): 217–22.

Kauffman, Craig M. n.d. “Democratization | Definition, Theories, & Facts.” Accessed January 7, 2026. <https://www.britannica.com/topic/democratization>.

Khaitan, Tarunabh. 2019. “Executive Aggrandizement in Established Democracies: A Crisis of Liberal Democratic Constitutionalism.” *International Journal of Constitutional Law* 17 (1): 342–56. <https://doi.org/10.1093/icon/moz018>.

Korean Constitution. n.d. “Korea (Republic of) 1948 (Rev. 1987) Constitution - Constitute.” Accessed June 13, 2025. [https://www.constituteproject.org/constitution/Republic\\_of\\_Korea\\_1987](https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987).

kumparanNews. 2022. *Presiden Baru Korsel Tak Bisa Hapus Kementerian “Feminis” Dengan Mudah* | Kumparan.Com. April 12, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/presiden-baru-korsel-tak-bisa-hapus-kementerian-feminis-dengan-mudah-1xrVJlezHvg>.

Lee, Sungdeuk, and Burhan Djibir Magenda. 2019. “Comparative Case Study on Institutionalization of Ruling Parties Under Military Authoritarianism: Democratic Republican Party Under Park Chung-Hee Regime in South Korea (1961-1979) and GOLKAR Under Suharto Regime in Indonesia (1966-1998).” SSRN Scholarly Paper No. 3502152. Rochester, NY: Social Science Research Network, December 11. <https://papers.ssrn.com/abstract=3502152>.

McCurry, Justin, Justin McCurry di Tokyo, and Justin McCurry. 2022. “Outcry as South Korean President Tries to Scrap Gender Equality Ministry to ‘Protect’ Women.” World News. *The Guardian*, October 7, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2022/oct/07/outcry-as-south-korean-president-tries-to-scrap-gender-equality-ministry-to-protect-women>.

Mi-na, Kim. 2023. “Memastikan kehadiran ‘Kejaksaan Agung’? Yoon menciptakan istilah ‘Gangbang’ dan berulang kali menyerang serikat pekerja.” 한겨레, February 22. [https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics\\_general/1080671.html](https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/1080671.html).

Min-sik, Yoon. 2013. “The full text of Park’s inaugural speech.” The Korea Herald, February 25. <https://www.koreaherald.com/article/4585>.

Muhammad, Akbar Siregar. 2025. “Dinamika Check Dan Balance Antar Lembaga Negara Di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi.” *Journal of Contemporary Law Studies*, August 7, 2025. <https://share.google/ZzVwc4QC5KYTeYb01>.

Myung-kim, Yung. n.d. “8 PATTERNS OF MILITARY RULE AND PROSPECTS FOR DEMOCRACY IN SOUTH KOREA from The Military and Democracy in Asia and the Pacific on JSTOR.” Accessed April 21, 2025. [https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbj1g.13?searchText=the+pattern+of+military+rule+and+prospects+for+democracy+in+south+korea&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dthe%2Bpattern%2Bof%2Bmilitary%2Brule%2Band%2Bprospects%2Bfor%2Bdemocracy%2Bin%2Bsouth%2Bkorea%26so%3Drel&ab\\_segments=0%2Fbasic\\_search\\_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Ab070eabf841c8f94a636c8bcc5221751&seq=1](https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbj1g.13?searchText=the+pattern+of+military+rule+and+prospects+for+democracy+in+south+korea&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dthe%2Bpattern%2Bof%2Bmilitary%2Brule%2Band%2Bprospects%2Bfor%2Bdemocracy%2Bin%2Bsouth%2Bkorea%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Ab070eabf841c8f94a636c8bcc5221751&seq=1).

Nasution, Mirza, and Milthree Saragih Geofani. 2025. *Efektivitas Penerapan Check and Balances: Perbandingan Presidensial Indonesia, Filipina, Dan Republik Korea*. 2025. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/43781/18938>.

“National Assembly South Korea.” n.d. Accessed March 4, 2026. [http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page\\_573.php](http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_573.php).

*NBC News*. 2025. “South Korea’s Ousted President Yoon Plotted Martial Law to Eliminate Rivals, Probe Finds.” December 15, 2025. <https://www.nbcnews.com/world/south-korea/south-koreas-ousted-president-yoon-plotted-martial-law-eliminate-rival-rcna249252>.

Neocleous, Mark. 2007. “Whatever Happened to Martial Law? Detainees and the Logic of Emergency.” *Radical Philosophy*, 2007. [https://www.researchgate.net/publication/291857621\\_Whatever\\_happened\\_to\\_martial\\_law\\_Detainees\\_and\\_the\\_logic\\_of\\_emergency](https://www.researchgate.net/publication/291857621_Whatever_happened_to_martial_law_Detainees_and_the_logic_of_emergency).

Owen, David. 2003. *9 Democracy from Political Concepts on JSTOR*. 2003. [https://www.jstor.org/content/oa\\_chapter\\_edited/j.ctt155jbcx.13?searchText=&searchUri=&ab\\_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3A7ebc739e1ae52361dbcad337c84d7530&initiator=recommender&seq=3](https://www.jstor.org/content/oa_chapter_edited/j.ctt155jbcx.13?searchText=&searchUri=&ab_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3A7ebc739e1ae52361dbcad337c84d7530&initiator=recommender&seq=3).

Rozaq, Muhammad Abdur, Surya Daniel Batara, and Muhamad Ramdan Jaya. 2024. “Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia.” *UNES Law Review* 6 (3): 8796–805. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1780>.

Seung-yoon, Yang. 2024. *Sejarah Korea: Semenanjung Korea dari Masa ke Masa*. Gramedia. <https://share.google/c7vHST0snioOEFSDq>.

Sleziak, Tomasz. 2013. “The Role of Confucianism in Contemporary South Korean Society.” *Annual of Oriental Studies - Rocznik Orientalistyczny* LXVI (January 2013): 27–46.

Stevens, Friso M. S. 2025. “Continuity and Change in Yoon Suk Yeol’s Positioning of South Korea as a Strong, Proactive, and Global Middle Power.” *International Politics*, ahead of print, June 21, 2025. <https://doi.org/10.1057/s41311-025-00698-6>.

*Tempo*. 2024. “Profil Moon Jae In, Eks Presiden Korea yang Jadi Tersangka Karena Carikan Jabatan untuk Menantu | tempo.co.” September 2, 2024. <https://www.tempo.co/internasional/profil-moon-jae-in-eks-presiden-korea-yang-jadi-tersangka-karena-carikan-jabatan-untuk-menantu-13270>.

———. 2025. “Perjalanan Karir Presiden Yoon Suk Yeol: dari Jaksa Cemerlang hingga Ditangkap Penyidik | tempo.co.” January 15, 2025. <https://www.tempo.co/internasional/perjalanan-karir-presiden-yoon-suk-yeol-dari-jaksa-cemerlang-hingga-ditangkap-penyidik-1194359>.

*The Korea Times*. 2022. "Full Text of President Yoon's Inaugural Address - The Korea Times." Southkorea. May 10, 2022. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20220510/full-text-of-president-yoons-inaugural-address>.

———. 2024a. *Yoon Says N. Korea's Missile Launch Aimed at Causing Confusion Ahead of Election - The Korea Times*. 2024. <https://www.koreatimes.co.kr/foreignaffairs/northkorea/20240402/korean-president-yoon-suk-yeol-says-north-koreas-missile-launch-aimed-at-election-confusion>.

———. 2024b. "Yoon Vetoes 3 Bills, Including Special Probe Targeting First Lady." October 2. <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20241002/south-korean-president-yoon-suk-yeol-vetoes-three-bills-including-special-probe-targeting-first-lady>.

THE REPUBLIC OF KOREA CHEONG WA DAE. n.d. "Greetings." Accessed December 23, 2025. <http://>.

Tirtalaksana\*, Christophorus Richard, Soekotjo Hardiwinoto, and Muchsin Idris. 2016. "TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYIKAPI KASUS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA DAN IMPLIKASI TERHADAP MASYARAKAT INTERNASIONAL." *Diponegoro Law Journal* 5 (2): 1–15.

Vinkanaswari, Resen, and Dewi. 2024. *Gerakan Penghapusan MOGEF Di Republik Korea Oleh People Power Party (PPP) Sebagai Political Branding*. Desember 2024. <https://share.google/wRDyWZUhhPKbjjDxq>.

Vitale, Alex, and Paul Chang. 2013. "Repressive Coverage In An Authoritarian Context: Threat, Weakness and Legitimacy In South Korea's Democracy Movement." *Mobilization* 18 (March 2013): 19–39. <https://doi.org/10.17813/maiq.18.1.p84k823062334831>.

Wastia, Ryan Muthiara. 2019. "MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN Republik Korea." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 31 (2): 237–51. <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.

Wong, Linda C., and Brian H. Kleiner. 1994. "Nepotism." *Work Study* 43 (5): 10–12. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000004002>.

Yim, Hyunsu. 2023. "As South Korean government proposes flexible overtime rules, some fear workers may suffer." Asia Pacific. *Reuters*, January 20, 2023. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-government-proposes-flexible-overtime-rules-some-fear-workers-may-2023-01-19/>.

## LAMPIRAN

Isi Deklarasi Darurat Militer:

### 제엄사령부 포고령(제1호)

(Kyeomsyareongbu pogoryong (Je-1 ho))

자유대한민국 내부에 암약하고 있는 반국가세력의 대한민국 체제전복 위협으로부터 자유민주주의를 수호하고, 국민의 안전을 지키기 위해 2024년 12월 3일 23:00부로 대한민국 전역에 다음 사항을 포고합니다.

(Jayudaehanmin-guk naebue amyaghago issneun bankukgaseryeogoei daehanmingug cejejeonbogwihyeoboerobuto jayuminjujuoei-reul suhohago, gugmin-eui anjeon-eul jikigi wihae 2024-nyeon 12-wol 3-il 23:00-buro daehanminguk jeonyeoke da-eum sarang-eul pogohabnida.)

1. 국회와 지방의회, 정당의 활동과 정치적 결사, 집회, 시위 등 일체의 정치활동을 금한다.

(Gukhwiwa jibangehwi, jongdang-eui hwaldonggwa jongcijog kyeolsa, jibhwi, siwi deung ilcye jeongciwaldong-eul geumhanda.)

2. 자유민주주의 체제를 부정하거나, 전복을 기도하는 일체의 행위를 금하고, 가짜뉴스, 여론조작, 허위선동을 금한다.

(Jayuminjuju-eui ceje-reul bujeonghagona, jeonbok-eul gidohaneun haengwi-reul geumhago, kajjanyuseu, yeoronjojak, heowiseondong-oel geumhanda.)

3. 모든 언론과 출판은 제엄사의 통제를 받는다.

(Modeun eonrongwa culpanen kyeomsaeui tongjereul badneunda.)

4. 사회혼란을 조장하는 파업, 태업, 집회행위를 금한다.

(Sahwihonran-eul jojangha-neun paeob, taeob, jibhwahaengwi-reul geumhanda.)

5. 전공의를 비롯하여 파업 중이거나 의료현장을 이탈한 모든 의료인은 48시간 내 본업에 복귀하여 충실히 근무하고 위반시는 제엄법에 의해 처단한다.

(Jeongong-eui-reul pirothayeo paeob jungikona euiryohyeonjang-eul italhan modeun euiryoineun 48-sigan nae boneobe pokkwihayeo cungsilhi geunmuhago wibansineun kyeombobe euihae ceodanhanda.)

6. 반국가세력 등 체제전복세력을 제외한 선량한 일반 국민들은 일상생활에 불편을 최소화할 수 있도록 조치한다.

(banguggaseryeog deung cejejeonbogseryeog-eul jewihan seonryanghan ilban gugmindeulen ilsangsaenghwale bolpyeon-eul cwesohwahal su itdorok jocihanda.)

이상의 포고령 위반자에 대해서는 대한민국 제엄법 제 9조(제엄사령관 특별조치권)에 의하여 영장없이 체포, 구금, 압수수색을 할 수 있으며, 제엄법 제 14조(벌칙)에 의하여 처단한다.

(Isang-eui pogoryeong wibanjae daehaeseo-neun daehanmingug kyeo-eombob je 9-jo(kye-eomsaryeonggan teuk byeoljocigwone) euihayeo yeongjangeobsi cepo, gugeum, absususaekul hal su issemyeon. Kyeoombob je 14-jo(beolcike) euihayeo ceodanhanda.)

2024.12.3.(화) 제엄사령관 육군대장 박안수.

(2024.12.3.(hwa) kyeomsaryeonggan yuggundaejang Park An-su).